



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**.PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR : PER-07/M.EKON/05/2012

TENTANG

**MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 06 Februari 2012 telah memutuskan Matriks tindak lanjut pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA.

(2) Matriks ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Matriks Tindaklanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

Pasal 2

- (1) Matriks Tindaklanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi:
- a. pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
 - b. acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ;
- oleh kementerian dan lembaga terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dapat dibahas dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari materi laporan tahunan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden, serta menjadi arahan untuk penyempurnaan rencana kerja atau kegiatan setiap kementerian dan lembaga.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

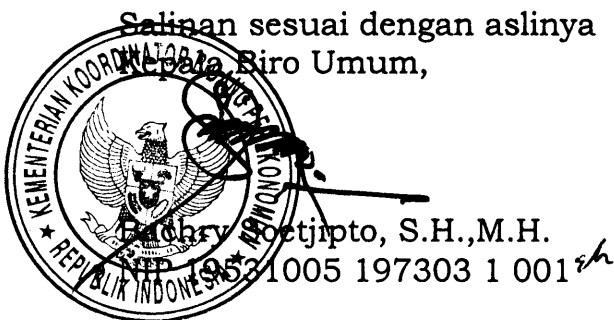
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

M. HATTA RAJASA





MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : PER-07/M.EKON/05/2012

TANGGAL : 08 MEI 2012

MATRIK TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR

A. KEBIJAKAN UMUM

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1.	Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
a	Menata ulang TUPOKSI lembaga terkait dengan Pengelolaan SDA untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	- Melaksanakan identifikasi dan evaluasi tanggung jawab serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah terkait pengelolaan SDA - Melaksanakan sinkronisasi tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah terkait pengelolaan SDA dan implementasinya - Menginformasikan dan menginstruksikan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan penyempurnaan tugas dan fungsi	- Terlaksananya identifikasi dan evaluasi - Terlaksananya sinkronisasi tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah dalam pengelolaan SDA - Terbitnya surat edaran tentang penyempurnaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerin tah terkait pengelolaan SDA	Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan program dalam pengelolaan SDA lintas sektor
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Melaksanakan telaahan dan kajian penataan kelembagaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDA	Terlaksananya penelaahan dan pengkajian serta rekomendasi tentang penataan kelembagaan terkait dengan pengelolaan SDA	
			Kementerian Dalam Negeri	Menyusun kebijakan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan SDA	Tersusunnya kebijakan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perumusan kembali tugas dan fungsi koordinasi dan perencanaan pengelolaan SDA di daerah	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perumusan kembali tugas dan fungsi koordinasi dan perencanaan pengelolaan SDA di daerah	
b	Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA selambatnya tahun 2015 di semua wilayah sungai (WS) sesuai dengan kewenangannya	2015	Dewan SDA Nasional	Merumuskan Rancangan Pola Pengelolaan SDA pada WS lintas negara dengan melibatkan pemilik kepentingan di WS yang bersangkutan	Terselesaikannya Rancangan Pola Pengelolaan SDA pada WS lintas negara	Ditetapkannya Pola Pengelolaan SDA di semua WS sesuai kewenangan
			Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Memfasilitasi penyelesaian konflik antarsektor dalam penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan SDA	Terfasilitasi penyelesaian konflik antarsektor dalam penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun Rancangan Pola Pengelolaan SDA dengan melibatkan pemilik kepentingan di WS yang bersangkutan	Tersusunnya Rancangan Pola Pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah	
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Memprogramkan rencana penyusunan Pola Pengelolaan SDA pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Terprogramkannya rencana penyusunan Pola Pengelolaan SDA pada RKP	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyampaikan masukan tentang kualitas air dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaikannya masukan tentang kualitas air dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Pertanian	Menyampaikan masukan tentang kebutuhan air untuk sektor pertanian dan pengembangan kawasan pertanian dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaikannya masukan tentang kebutuhan air untuk sektor pertanian dan pengembangan kawasan pertanian dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Kesehatan	Menyampaikan masukan tentang kebutuhan air sektor kesehatan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaikannya masukan tentang kebutuhan air sektor kesehatan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kehutanan	Menyampaikan masukan tentang potensi dan perlindungan SDA di kawasan hutan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya masukan tentang potensi dan perlindungan SDA di kawasan hutan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Perhubungan	Menyampaikan masukan tentang kebutuhan dan pengembangan transportasi sungai dan danau dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya masukan tentang kebutuhan dan pengembangan transportasi sungai dan danau dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Perindustrian	Menyampaikan masukan tentang proyeksi kebutuhan air sektor industri di luar dan di dalam kawasan industri dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya masukan tentang proyeksi kebutuhan air sektor industri di luar dan di dalam kawasan industri dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyampaikan masukan tentang pengelolaan air tanah dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA.	Tersampaiannya masukan tentang pengelolaan air tanah dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan masukan tentang kebutuhan air untuk sektor kelautan dan perikanan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya masukan tentang kebutuhan air untuk sektor perikanan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Menyampaikan hasil-hasil penelitian SDA sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya hasil-hasil penelitian SDA sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	
			Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Menyampaikan informasi curah hujan sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampaiannya informasi curah hujan sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	- Menyusun Rancangan Pola Pengelolaan SDA dengan melibatkan pemilik kepentingan terkait di WS yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya - Menyampaikan masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA untuk WS di luar kewenangannya	- Tersusunnya Rancangan Pola Pengelolaan SDA dengan melibatkan pemilik kepentingan terkait di WS yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya - Tersampainya masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA untuk WS di luar kewenangan	
c	Meningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan SDA Nasional dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pekerjaan Umum Seluruh Anggota Dewan SDAN	Menyelenggarakan kegiatan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Dewan SDA Nasional Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional melalui sekretariat Dewan SDA Nasional Berperan aktif dalam setiap kegiatan Dewan SDA Nasional	Terselenggaranya kegiatan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Dewan SDA Nasional Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional melalui sekretariat Dewan SDA Nasional Terlaksananya peran aktif dalam setiap kegiatan Dewan SDA Nasional	Terwujudnya efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan SDA Nasional dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan
d	Membentuk Dewan SDA Provinsi oleh pemerintah provinsi selambatnya pada akhir tahun 2011 serta memfasilitasi agar dapat berfungsi secara optimal	2011	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Dalam Negeri	Melaksanakan pendampingan dalam pembentukan Dewan SDA Provinsi - Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Dewan SDA Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Melaksanakan pemantauan realisasi pembentukan Dewan SDA Provinsi	Terlaksananya pendampingan dalam pembentukan Dewan SDA Provinsi - Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Dewan SDA Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Terlaksananya pemantauan realisasi pembentukan Dewan SDA Provinsi	Terbentuk dan terfasilitasinya Dewan SDA Provinsi agar dapat berfungsi secara optimal



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Mendorong dinas yang membidangi ESDM di provinsi untuk ikut aktif dalam pembentukan Dewan SDA Provinsi	Terlaksananya peran aktif dinas yang membidangi ESDM di provinsi dalam pembentukan Dewan SDA Provinsi	
			Pemerintah Daerah	Membentuk Dewan SDA Provinsi	Terbentuknya Dewan SDA Provinsi berikut perangkatnya	
e	Membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di WS strategis nasional	1 thn stlh Kepres WS di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Membentuk dan memfasilitasi TKPSDA di WS strategis nasional	Terbitnya Surat Keputusan Pembentukan TKPSDA pada WS strategis nasional dan terfasilitasinya kegiatan TKPSDA	Terbentuk dan meningkatnya fungsi TKPSDA pada WS strategis nasional
f	Membentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di WS lintas kab/kota dengan intensitas permasalahan tinggi oleh pemerintah provinsi	1 thn stlh Kepres WS di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pendampingan untuk mengefektifkan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota	Terlaksananya pendampingan untuk mengefektifkan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota	Terbentuk dan meningkatnya fungsi TKPSDA pada WS lintas kab/kota
			Pemerintah Daerah	Membentuk dan memfasilitasi TKPSDA di WS lintas kabupaten/kota	Terbitnya Surat Keputusan Pembentukan TKPSDA pada WS lintas kabupaten/kota dan terfasilitasinya kegiatan TKPSDA	
g	Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas provinsi dan lintas kab/kota	Menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi terlaksananya fungsi TKPSDA pada WS lintas provinsi, WS strategis nasional dan WS lintas negara.	Terfasilitasinya fungsi TKPSDA pada WS lintas provinsi, WS strategis nasional dan WS lintas negara.	Terwujudnya penguatan peran TKPSDA pada WS lintas provinsi, WS strategis nasional dan WS lintas negara dalam rangka sinkronisasi program dan anggaran
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun program dan anggaran di setiap Pusat Pengelolaan Ekoregion untuk memperkuat peran TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program dan anggaran	Tersusunnya program dan anggaran di setiap Pusat Pengelolaan Ekoregion untuk memperkuat peran TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program dan anggaran	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi terselenggaranya peran TKPSDA WS lintas kabupaten/kota	Terfasilitasinya penyelenggaraan peran TKPSDA WS lintas kabupaten/kota	Terwujudnya penguatan peran TKPSDA WS lintas kab/kota dalam rangka sinkronisasi program dan anggaran
2.	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta budaya terkait air					
a	Membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.	Menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	Tersusunnya materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan pelatihan teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Melakukan survei perilaku ramah lingkungan - Memberikan apresiasi terhadap pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan di sekolah, pelaku usaha dan masyarakat	- Terlaksananya pelatihan teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Terlaksananya survei perilaku ramah lingkungan - Diterimanya apresiasi terhadap pendidikan lingkungan hidup, yang diselenggarakan di sekolah, pelaku usaha dan masyarakat	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	- Melaksanakan pelatihan dan penguatan kelembagaan petani pengelola air (P3A/ GP3A/IP3A) - Melaksanakan partisipasi dan pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi - Melaksanakan pemberian penghargaan kepada P3A/ GP3A/ IP3A melalui penyelenggaraan lomba tingkat nasional - Melaksanakan Sekolah Lapang (SLI, SRI, Konservasi, SLPHT, SLPTT)	- Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan petani pengelola air (P3A/ GP3A/IP3A) - Terlaksananya partisipasi dan pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi - Terlaksananya pemberian penghargaan kepada P3A/ GP3A/ IP3A melalui penyelenggaraan lomba tingkat nasional - Terlaksananya Sekolah Lapang (SLI, SRI, Konservasi, SLPHT, SLPTT)	Terbangunnya etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
			Kementerian Kesehatan	- Menyusun materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air - Mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air.	- Tersusunnya materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air - Terlaksananya pengembangan institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air	
			Kemenerian Kehutanan	Menyusun materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	Tersedianya materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Menyusun materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal di bidang air tanah	Tersedianya materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal di bidang air tanah	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	- Memasukkan pengetahuan tentang pentingnya SDA ke dalam materi ajar dalam pendidikan tinggi - Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya SDA dalam kehidupan melalui program pengabdian kepada masyarakat	- Termuatnya pengetahuan tentang pentingnya SDA ke dalam materi ajar dalam pendidikan tinggi - Terlaksananya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya SDA dalam kehidupan melalui program pengabdian kepada masyarakat	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menyusun materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	Tersusunnya materi tentang etika serta budaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan kementerian yang membidangi pendidikan	
			Pemerintah Daerah	Menyusun materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal sesuai kewenangannya	Tersusunnya materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal	
			HKTI	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pendayagunaan air yang efisien serta mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan usaha tani.	Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pendayagunaan air yang efisien serta mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan usaha tani.	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			KTNA	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pendayagunaan air yang efisien, serta mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran air	Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan ketrampilan, dan dalam pendayagunaan air yang efisien serta mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran air	
			PERPAMSI	Melaksanakan lokakarya bersama lembaga terkait, untuk membangun etika dan budaya masyarakat tentang nilai dan manfaat air.	Terlaksananya lokakarya untuk membangun etika dan budaya masyarakat tentang nilai dan manfaat air.	
			ASPADIN	- Melaksanakan sosialisasi tentang etika dan budaya air kepada para pemilik kepentingan - Melaksanakan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konservasi SDA di daerah tangkapan dan imbuhan air, serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah eksploitasi dalam pemanfaatan air	- Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya air para pemilik kepentingan - Terlaksananya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konservasi SDA di daerah tangkapan dan imbuhan air, serta terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah eksploitasi dalam pemanfaatan air	
			GAPKINDO	Melaksanakan lokakarya bersama lembaga terkait, untuk membangun etika dan budaya dunia usaha tentang nilai dan manfaat air.	Terlaksananya lokakarya untuk membangun etika dan budaya dunia usaha tentang nilai dan manfaat air.	
			KAI	- Melaksanakan dialog, seminar, dan lokakarya, antarpemilik kepentingan dibidang SDA tentang penerapan Pengelolaan SDA Terpadu - Melaksanakan kajian tentang perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan SDA terpadu	- Terlaksananya dialog, seminar, dan lokakarya antarpemilik kepentingan bidang SDA tentang penerapan Pengelolaan SDA Terpadu - Terlaksananya kajian tentang perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan SDA terpadu	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			KAI	- Melaksanakan pelatihan fasilitator dialog antarpemilik kepentingan di bidang SDA - Melaksanakan pelatihan mengenai penerapan Pengelolaan SDA Terpadu bagi para jurnalis - Melaksanakan pelatihan untuk penulisan kasus-kasus penting dalam penerapan akan Pengelolaan SDA Terpadu sesuai pedoman internasional - Melaksanakan pelatihan mengenai metoda pemetaan manfaat dan dampak (<i>outcome mapping</i>) dan penerapannya dibidang SDA	- Terlaksananya pelatihan fasilitator dialog antarpemilik kepentingan di bidang SDA - Terlaksananya pelatihan mengenai penerapan Pengelolaan SDA Terpadu bagi para jurnalis - Terlaksananya pelatihan untuk penulisan kasus-kasus penting dalam penerapan akan Pengelolaan SDA Terpadu sesuai pedoman internasional - Terlaksananya pelatihan mengenai metoda pemetaan manfaat dan dampak (<i>outcome mapping</i>) dan penerapannya dibidang SDA	
			JKPA	Berperan aktif dalam pelaksanaan gerakan nasional kemitraan untuk penyelamatan air (GNKPA) dalam rangka memberdayakan kearifan lokal pengelolaan SDA	Terlaksananya peran aktif GNKPA di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa	
			YAAE/ ASBINDO	Melaksanakan sosialisasi tentang etika dan budaya air kepada para pemilik kepentingan	Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya air kepada para pemilik kepentingan	
			YGN	Mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang tradisi adat masyarakat dan kearifan lokal terkait konservasi SDA melalui media cetak dan elektronik	Terlaksananya publikasi dan tersebarluaskannya informasi tentang tradisi adat masyarakat dan kearifan lokal terkait konservasi SDA melalui media cetak dan elektronik	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			LP3ES	Memberikan pembekalan materi lingkungan hidup kepada tenaga pendidik di lembaga pendidikan formal	Terlaksananya pembekalan materi lingkungan hidup kepada tenaga pendidik di lembaga pendidikan formal	
			METI	Mempublikasikan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan SDA sebagai sumber energi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).	Terlaksananya publikasi dan tersebarluaskannya pengetahuan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan SDA sebagai sumber energi untuk pembangunan PLTMH.	
			RTMB	- Memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat berbasis kearifan lokal dan etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air - Melaksanakan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan masyarakat lokal yang peduli terhadap budaya dan manfaat air	- Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas berbasis kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai manfaat air - Terlaksananya pendampingan dalam memperkuat kelembagaan masyarakat lokal yang peduli terhadap budaya dan manfaat air	
			IMA	Melaksanakan sosialisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA di lingkungan masyarakat pertambangan	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA di lingkungan masyarakat pertambangan	
			APHI	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis mengenai Pengelolaan Hutan Lestari kepada para anggota APHI	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis mengenai Pengelolaan Hutan Lestari kepada para anggota APHI	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi tentang etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air kepada para Pengelola Bendungan dan Konsultan	Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air kepada para Pengelola Bendungan dan Konsultan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA serta menerapkan hasil-hasilnya dengan meningkatkan alokasi dana	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Meningkatkan alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi bidang SDA serta penerapannya.	Meningkatnya alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi bidang SDA serta penerapannya.	Terwujudnya dan diterapkannya penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA yang berkualitas
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Menyusun rencana pembangunan nasional yang mengakomodasi kebutuhan dana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan bidang SDA serta penerapannya	Tersusunnya rencana pembangunan nasional yang mengakomodasi kebutuhan dana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan bidang SDA serta penerapannya	
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan lahan dan air di bidang pertanian	Meningkatnya alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan lahan dan air di bidang pertanian	
			Kementerian Kesehatan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian tentang pola penyakit, kesehatan lingkungan, dan perilaku higienis masyarakat terkait dengan pengelolaan SDA	Meningkatnya penelitian, dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian tentang pola penyakit, kesehatan lingkungan, dan perilaku higienis masyarakat terkait dengan pengelolaan SDA	
			Kementerian Kehutanan	Meningkatkan alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta penerapannya	Meningkatnya alokasi dana untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan teknologi konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta penerapannya	
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi industri terkait dengan pendayagunaan SDA	Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi industri terkait dengan pendayagunaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan air tanah	Meningkatnya alokasi dana penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan air tanah	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Meningkatkan alokasi dana insentif penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA	Meningkatnya alokasi dana insentif penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Memfasilitasi peningkatan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya terkait SDA	Terfasilitasinya peningkatan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya terkait SDA	
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Meningkatkan penelitian dan pengembangan model prakiraan curah hujan dalam mendukung pengelolaan SDA	Meningkatnya penelitian dan pengembangan model prakiraan curah hujan dalam mendukung pengelolaan SDA	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Meningkatkan alokasi dana untuk : 1. Meningkatkan penelitian serta pengembangan konsep dan teknologi pengelolaan SDA 2. Melaksanakan dan meningkatkan pengkajian : a. teknologi pengolahan air bersih b. pengendalian pencemaran c. pemantauan kualitas air d. pengembangan biodiversitas. e. tingkat produktivitas sumberdaya air. f. daya dukung dan daya tampung sumber daya air. g. penetapan zonasi pemanfaatan sumber daya air.	Meningkatnya ketersediaan dana untuk : 1. Meningkatkan penelitian serta pengembangan konsep dan teknologi pengelolaan SDA 2. Terlaksananya dan meningkatnya pengkajian : a. teknologi pengolahan air bersih b. pengendalian pencemaran c. pemantauan kualitas air d. pengembangan biodiversitas. e. tingkat produktivitas sumberdaya air. f. daya dukung dan daya tampung sumber daya air. g. penetapan zonasi Pemanfaatan sumber daya air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				h. pengendalian alih fungsi lahan. i. kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air. j. pemulihan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air. k. motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air. 3. Menerbitkan jurnal tentang pengelolaan sumber daya air	h. pengendalian alih fungsi lahan. i. Kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air. j. pemulihan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air. k. motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air. 3. terbitnya jurnal tentang pengelolaan sumber daya air	
			Pemerintah Daerah	- Memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan daerah untuk meningkat kan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan SDA - Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan SDA kepada kabupaten/kota	- Terlaksananya pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan SDA - Terlaksananya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan SDA kepada kabupaten/kota	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
c	Meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang SDA antarlembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional	menerus	Kementerian Kesehatan	Meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi terkait pengelolaan SDA melalui pembentukan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (JPPKN).	Meningkatnya jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi terkait pengelolaan SDA melalui JPPKN	Terwujudnya sinergi dalam penyusunan program penelitian dan pengembangan SDA untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan air limbah industri dengan lembaga nasional dan internasional	Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan air limbah industri dengan lembaga nasional dan internasional	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan air tanah	Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan air tanah	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan SDA di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lembaga nasional dan internasional	Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan SDA di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lembaga nasional dan internasional	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan SDA antarlembaga penelitian	Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan SDA antarlembaga penelitian	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Memfasilitasi peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan SDA antarperguruan tinggi dan lembaga nasional dan internasional yang terkait SDA	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan SDA antarperguruan tinggi dan lembaga nasional dan internasional yang terkait SDA	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam kegiatan penelitian dan pengembangan keterkaitan curah hujan dan pengelolaan SDA	Meningkatnya kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam penelitian dan pengembangan keterkaitan curah hujan dan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan sumber daya air serta teknologi pemanfaatan, pemanenan dan pengolahan air	Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan sumber daya air serta teknologi pemanfaatan, pemanenan dan pengolahan air	
d	memfasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA		Kementerian Kesehatan	- Melaksanakan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - Memfasilitasi peneliti atau penemu ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkait SDA dalam bentuk konsultasi dan pendaftaran hasil-hasil penelitian dan penemuan yang berorientasi perolehan HKI	- Terlaksananya sosialisasi HKI - Terfasilitasinya peneliti atau penemu ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkait SDA dalam bentuk konsultasi dan pendaftaran hasil-hasil penelitian dan penemuan yang berorientasi perolehan HKI	Terwujudnya kemudahan dalam pengurusan HAKI bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memfasilitasi perolehan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	Terfasilitasinya perolehan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	
			Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Memfasilitasi perolehan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	Terfasilitasinya perolehan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Meningkatkan kepedulian tentang manfaat HKI serta melaksanakan bimbingan dalam memperoleh HKI bidang SDA	Meningkatnya kepedulian tentang manfaat HKI serta terlaksananya bimbingan dalam memperoleh HKI bidang SDA	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi pengusulan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	Terfasilitasinya pengusulan HKI bagi penemu ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	
e	Menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan inventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Terlaksananya inventarisasi keberadaan MHA dan kearifan lokal yg terkait dengann perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terjaminnya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA atas SDA	- Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan dalam pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA atas SDA	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan inventarisasi keberadaan hak ulayat MHA atas SDA dalam kawasan hutan sebagai bahan pertimbangan untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	Terlaksananya inventarisasi keberadaan hak ulayat MHA atas SDA dalam kawasan hutan sebagai bahan pertimbangan untuk pengukuhan	
			Pemerintah Daerah	Menerbitkan peraturan daerah tentang hak ulayat MHA	Terbitnya peraturan daerah tentang hak ulayat MHA	
			SKEPHI	Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA atas SDA	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA atas SDA	
			YGN	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi melalui ekspedisi dan observasi keberadaan MHA yang mempertahankan nilai kearifan lokal terkait SDA untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi melalui ekspedisi dan observasi keberadaan MHA yang mempertahankan nilai kearifan lokal terkait SDA untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	
			TELAPAK	Mengumpulkan dan mendokumentasikan serta mempublikasikan data dan informasi tentang hak ulayat MHA atas SDA	Terkumpulnya dan terdokumentasi serta terpublikasikannya data dan informasi tentang hak ulayat MHA atas SDA	
			RTMB	Memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
3.	Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan SDA					
a	mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA, yang berasal dari anggaran pemerintah	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA	Terlaksananya koordinasi kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA	Terwujudnya ketersediaan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA
			Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengelolaan SDA sesuai dengan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan yang telah dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan SDA sesuai dengan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan yg telah dikembangkan	
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Melaksanakan telaah dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA	Terlaksananya telaah dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA	
			Kementerian Pertanian	Memfasilitasi pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA dalam kegiatan usaha tani	Terfasilitasinya sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA dalam kegiatan usaha tani	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan serta pembiayaan pengelolaan kawasan hutan untuk konservasi SDA	Terlaksananya pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan serta pembiayaan pengelolaan kawasan hutan untuk konservasi SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan air tanah	Terlaksananya pengembangan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan air tanah	
b	meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Terfasilitasinya dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan pedoman pembayaran jasa lingkungan terkait SDA	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan pedoman pembayaran jasa lingkungan terkait SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat tani untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Terfasilitasinya dunia usaha dan masyarakat tani dalam berkontribusi untuk pengelolaan SDA	
			Kementerian Kehutanan	Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Terfasilitasinya dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk pengelolaan SDA	
			Kementerian Perhubungan	Meningkatkan peranserta dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengembangan SDA untuk transportasi sungai dan danau	Meningkatnya peranserta dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengembangan SDA untuk transportasi sungai dan danau	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk konservasi air tanah	Meningkatnya kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk konservasi air tanah	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan kontribusi dalam bentuk peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA	Meningkatnya kontribusi dalam bentuk peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			ASBINDO	Melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban berkontribusi dari pelaku usaha pertanian hortikultura dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya sosialisasi tentang kewajiban berkontribusi dari pelaku usaha pertanian hortikultura dalam pengelolaan SDA	
			PERPAMSI	Memfasilitasi anggota Perpamsi untuk mentaati kewajiban berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya fasilitasi anggota Perpamsi untuk mentaati kewajiban berkontribusi dalam pengelolaan SDA	
			ASPADIN	- Meningkatkan peran dunia usaha dalam menerapkan <i>reduce, reuse and recycle</i> (3R) dalam penggunaan air - Menyusun skema kemitraan pembiayaan pengelolaan SDA terutama pada DAS di wilayah usahanya	- Meningkatnya peran dunia usaha dalam menerapkan 3R dalam penggunaan air - Tersusunnya skema kemitraan pembiayaan pengelolaan SDA terutama pada DAS di wilayah usahanya	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	- Meningkatnya keterlibatan dunia usaha dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	
			GAPKINDO	Meningkatkan peran dunia usaha dalam menerapkan 3R	Meningkatnya peran dunia usaha dalam menerapkan 3R	
			APHI	Meningkatkan ketaatan pengusaha hutan dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban berkontribusi untuk melindungi kawasan konservasi terkait pengelolaan SDA	Meningkatnya ketaatan pengusaha hutan dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban berkontribusi untuk melindungi kawasan konservasi terkait pengelolaan SDA	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban berkontribusi kepada para pemilik dan pengelola bendungan untuk pengelolaan SDA	Terlaksananya sosialisasi tentang kewajiban berkontribusi kepada para pemilik dan pengelola bendungan untuk pengelolaan SDA	
c	Meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan (BJP) SDA dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan SDA	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menetapkan pedoman perhitungan nilai perolehan air sebagai rujukan daerah untuk penetapan BJP SDA - Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) sebagai lembaga yang menerapkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan yang telah disusun	- Ditetapkannya pedoman perhitungan nilai perolehan air sebagai rujukan daerah untuk penetapan BJP SDA - Terbentuknya BLU pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan hasil penerimaan dari BJP SDA dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan SDA
			Kementerian Kehutanan	- Mengupayakan alokasi sebagian pembiayaan untuk pengelolaan hutan dari komponen Biaya Jasa pengelolaan (BJP) SDA	- Tersedianya alokasi sebagian pembiayaan untuk pengelolaan hutan dari komponen Biaya Jasa pengelolaan (BJP) SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Memasukkan besaran nilai tarif untuk pemanfaatan air dan energi air, dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang tarif PNBPN di bidang Kehutanan	- Termuatnya besaran nilai tarif untuk pemanfaatan air dan energy air, dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang tarif PNBPN di bidang Kehutanan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyempurnakan pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai rujukan daerah untuk penetapan BJP SDA	Tersedianya pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai rujukan daerah untuk penetapan BJP SDA	
			Pemerintah Daerah	- Menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah Jasa Pengelolaan SDA - Menyusun perhitungan nilai perolehan air sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan BJP SDA sesuai kewenangan	- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah Jasa Pengelolaan SDA - Tersusunnya perhitungan nilai perolehan air sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan BJP SDA sesuai kewenangan	
d	Memanfaatkan hasil penerimaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan		Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA.	Terwujudnya pemanfaatan hasil penerimaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan
			Kementerian Kehutanan	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA untuk pengelolaan hutan	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA untuk pengelolaan hutan.	
			Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan pemanfaatan BJP SDA terkait air tanah	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan pemanfaatan BJP SDA terkait air tanah	
			Pemerintah Daerah	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA sesuai kewenangan	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA sesuai kewenangan.	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
4.	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum					
a	mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan SDA dengan melibatkan peran masyarakat	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Membangun sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat	Tersedianya sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat	Terwujudnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan SDA dengan melibatkan peran masyarakat
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di kawasan lindung yang melibatkan masyarakat - Menetapkan peruntukan air sesuai dengan mutu dan kondisi yang disyaratkan - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang penerapan ketetapan peruntukan air sesuai dengan mutu dan kondisi yang disyaratkan	- Terwujudnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik di kawasan lindung - Ditetapkannya peruntukan air sesuai dengan mutu dan kondisi yang disyaratkan. - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi tentang penerapan ketetapan peruntukan air sesuai dengan mutu dan kondisi yang disyaratkan	
			Kementerian Kesehatan	Menyusun <i>roadmap</i> dan melaksanakan sistem pengawasan kualitas air minum	Tersedianya <i>roadmap</i> dan terlaksananya sistem pengawasan kualitas air minum	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mengembangkan sistem pengawasan pengelolaan air tanah - Mensosialisasikan sistem pengawasan pengelolaan air tanah kepada pemerintah daerah dan masyarakat	- Tersedianya sistem pengawasan pengelolaan air tanah yang lebih baik - Tersosialisasinya sistem pengawasan pengelolaan air tanah kepada pemerintah daerah dan masyarakat	
b	mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang SDA pada setiap WS	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan percepatan pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pada setiap WS lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional	Terlaksananya percepatan pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pada setiap WS lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional	Terlaksananya penegakan hukum bidang SDA



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA	Meningkatnya pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA	
			Kementerian Perhubungan	Meningkatkan pembinaan PPNS Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dalam penegakan hukum bidang SDA	Meningkatnya pembinaan PPNS ASDP dalam penegakan hukum bidang SDA	
			Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Meningkatkan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait air tanah	Meningkatnya pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan percepatan pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pada setiap WS sesuai kewenangan	Terlaksananya percepatan pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pada setiap WS sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

B. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SDA) SECARA TERUS-MENERUS

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1.	Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air					
a	memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada suatu wilayah sungai oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan :					
	1) meningkatkan pengendalian budi daya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air	menerus	Kementerian Pertanian	Melaksanakan pembinaan pada petani dan masyarakat di DAS hulu dalam pengendalian budi daya pertanian	Terlaksananya pembinaan pada petani dan masyarakat di DAS hulu dalam pengendalian budi daya pertanian	Terwujudnya peningkatan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air pada kawasan yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air pada kawasan yang menjadi kewenangannya	
			HKTI	Mendukung dan berperan serta dalam melaksanakan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	Terlaksananya dukungan dan peranserta dalam pelaksanaan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			APHI	Melaksanakan pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam budidaya pertanian lahan kering yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi	Terlaksananya pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam budidaya pertanian lahan kering yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi	
	2) meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, dan menambah ruang terbuka hijau	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyampaikan masukan untuk penyusunan pedoman teknis pembuatan sumur imbuhan - Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis pembuatan sumur resapan - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi efektifitas sumur resapan - Meningkatkan pembangunan waduk dan embung sebagai upaya pengawetan air. - Mencantumkan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)	- Tersampainya masukan untuk penyusunan pedoman teknis pembuatan sumur imbuhan - Terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pembuatan sumur resapan - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi efektifitas sumur resapan - Meningkatnya pembangunan waduk dan embung sebagai upaya pengawetan air. - Termuatnya ruang terbuka hijau dalam RTRW	Terwujudnya peningkatan tampungan air guna mendukung konservasi SDA
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Mengkoordinasikan dan mensinergikan penyusunan rencana pembangunan terkait dengan pengembangan tampungan air	Terlaksananya koordinasi dan sinergi penyusunan rencana pembangunan terkait dengan pengembangan tampungan air	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan model percontohan pembangunan sumur resapan dan penanaman pohon	Terlaksananya model percontohan pembangunan sumur resapan dan penanaman pohon	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pengembangan embung, dam parit, dan sumur resapan	Terlaksananya pengembangan embung, dam parit, dan sumur resapan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan kegiatan sipil teknik berupa pembangunan dam pengendali, sumur resapan, biopori, dan rorak.	Terlaksananya kegiatan sipil teknik berupa pembangunan dam pengendali, sumur resapan, biopori, rorak.	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pembuatan sumur imbuhan guna meningkatkan potensi air tanah	Ditetapkannya pedoman teknis pembuatan sumur imbuhan guna meningkatkan potensi air tanah	
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Meningkatkan penyediaan informasi curah hujan pada kawasan yang memiliki potensi pengembangan tampungan air	Meningkatnya penyediaan informasi curah hujan pada kawasan yang memiliki potensi pengembangan tampungan air	
			Pemerintah Daerah	Membangun lebih banyak kolam retensi, embung dan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan kekeringan dan banjir	Terbangunnya kolam retensi, embung dan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan kekeringan dan banjir	
			ASBINDO	Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya pembangunan waduk, embung, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya pembangunan waduk, embung, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau	
			LP3ES	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan waduk, embung, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan waduk, embung, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada para anggota untuk membangun embung dan waduk kecil guna penyimpanan air saat kemarau untuk mengantisipasi kebakaran hutan	Terlaksananya pembinaan kepada para anggota untuk membangun embung dan waduk kecil guna penyimpanan air saat kemarau untuk mengantisipasi kebakaran hutan	
			KNI-BB	Memberikan dukungan kepada pemilik bendungan dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaan bendungan	Diterimanya dukungan kepada pemilik bendungan dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan bendungan	
	3) mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri	menerus	Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembinaan teknis dalam mencegah penurunan fungsi resapan air	Terlaksananya pembinaan teknis dalam mencegah penurunan fungsi resapan air	Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri
			Kementerian Pertanian	- Melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat - Melaksanakan percepatan penerbitan/pengesahan turunan dari peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat	- Terlaksananya sosialisasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat - Terlaksananya percepatan penerbitan/pengesahan turunan dari peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah dan masyarakat	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Mencegah alih fungsi lahan dengan tidak memberikan ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan	Terjaganya alih fungsi lahan dengan tidak memberikan ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan	
			METI	Menyampaikan informasi dan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mengenai minimal luasan hutan yang diperlukan untuk keberlangsungan suplai air PLTMH	Tersampaiannya informasi dan terlaksananya pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat PLTMH mengenai minimal luasan hutan yang diperlukan untuk keberlangsungan suplai air PLTMH	
			APHI	Mempertahankan kawasan kerja yang telah mendapatkan ijin sah agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan non-hutan.	Terjaganya kawasan kerja yang telah mendapatkan ijin sah agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan non-hutan.	
	4) menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah yang hasilnya dapat di akses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah	2 tahun setelah Kepres Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun pedoman tentang penetapan kawasan lindung air tanah - Menyusun pedoman tentang penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah - Memetakan dan menetapkan serta mensosialisasikan zona imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	- Tersusunnya pedoman tentang penetapan kawasan lindung air tanah - Tersusunnya pedoman tentang penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah - Terlaksananya pemetaan dan penetapan serta sosialisai zona imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	Terwujudnya penentuan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah yang dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memberikan dukungan teknis kepada Kementerian ESDM dalam memelihara kelangsungan fungsi zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah	Diterimanya dukungan teknis kepada Kementerian ESDM dalam memelihara kelangsungan fungsi zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan data dan informasi curah hujan pada zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah	Tersedianya data dan informasi curah hujan pada zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah di dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman dari Pemerintah	Ditetapkannya zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah di dalam RTRW Provinsi / Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman dari Pemerintah	
	5) melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu dengan capaian 2.5 juta ha	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan pembinaan teknis mengenai kelestarian lingkungan di wilayah DAS prioritas - Melaksanakan inventarisasi tutupan lahan untuk menentukan status kerusakan hutan dan lahan di DAS	- Terlaksananya pembinaan teknis mengenai kelestarian lingkungan di wilayah DAS prioritas - Terlaksananya inventarisasi tutupan lahan untuk menentukan status kerusakan hutan dan lahan di DAS	Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas melalui pelaksanaan rehabilitasi DAS prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pembinaan usaha tani konservasi untuk mendukung rehabilitasi dan konservasi lahan	Terlaksananya pembinaan usaha tani konservasi untuk mendukung rehabilitasi dan konservasi lahan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas.	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas.	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas sesuai kewenangan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara partisipatif pada DAS prioritas sesuai kewenangan	
			HKTI	Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan terbuka dan pekarangan berbasis konservasi air	Terlaksananya sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan terbuka dan pekarangan berbasis konservasi air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			KAI	Melaksanakan dialog antarpemilik kepentingan terkait SDA mengenai upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas	Terlaksananya dialog antarpemilik kepentingan terkait SDA mengenai upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas	
			JIKPA	Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas	
			PSDA WATCH	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam pembentukan kader pelestarian lingkungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam pembentukan kader pelestarian lingkungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas	
			LP3ES	Melaksanakan pendampingan dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui model pembayaran jasa lingkungan	Terlaksananya pendampingan dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui model pembayaran jasa lingkungan	
			TELAPAK	Membangun inisiatif pengelolaan hutan secara lestari yang mampu menjaga perlindungan dan pelestarian SDA	Terbangunnya inisiatif pengelolaan hutan secara lestari yang mampu menjaga perlindungan dan pelestarian SDA	
			METI	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pemanfaat PLTMH untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yang memiliki potensi sumber air	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pemanfaat PLTMH untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yang memiliki potensi sumber air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			RTMB	- Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada kawasan konservasi secara partisipatif - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada kawasan konservasi	- Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada kawasan konservasi secara partisipatif - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada kawasan konservasi	
			IMA	Melaksanakan <i>One Man One Tree</i> (OMOT) dan pendayagunaan lahan bekas penambangan (<i>green mining</i>) pada hutan dan lahan di DAS prioritas	Terlaksananya <i>OMOT</i> dan pendayagunaan lahan bekas penambangan (<i>green mining</i>) pada hutan dan lahan di DAS prioritas	
			APHI	Merehabilitasi lahan terbuka dan kawasan berfungsi lindung dalam areal kerja pemanfaatan hutan	Terlaksananya rehabilitasi lahan terbuka dan kawasan berfungsi lindung dalam areal kerja pemanfaatan hutan	
	6) menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan analisis kebutuhan luas daerah tangkapan dan resapan air dalam penyusunan RTRW dan Pola Pengelolaan SDA untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimum 30% dari luas DAS dan/atau pulau	Terlaksananya analisis kebutuhan luas daerah tangkapan dan resapan air dalam penyusunan RTRW dan Pola Pengelolaan SDA untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimum 30% dari luas DAS dan/atau pulau	Terwujudnya kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau, dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan
			Kementerian Dalam Negeri	- Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang RTRW provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% dengan sebaran yang proporsional	- Terlaksananya evaluasi peraturan daerah tentang RTRW provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% dengan sebaran yang proporsional	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan ketentuan RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan ketentuan RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun dan melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk mendorong dipertahankannya luas minimal kawasan hutan	Tersusun dan terlaksananya kebijakan insentif dan disinsentif berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk mendorong dipertahankannya luas minimal kawasan hutan	
			Kementerian Kehutanan	- Melaksanakan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan di dalam RTRW. - Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memenuhi luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau. - Menetapkan dan menjaga tata batas, reboisasi dan rehabilitasi serta program sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan tegakan yang luasnya lebih dari 30%	- Terlaksananya tata batas dan pengukuhan kawasan hutan di dalam RTRW. - Terlaksananya reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memenuhi luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau. - Ditetapkan dan terjaganya tata batas, reboisasi dan rehabilitasi serta program sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan tegakan yang luasnya lebih dari 30%	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan ketetapan untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau	Terlaksananya ketetapan untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada para anggota untuk mengelola hutan secara lestari guna mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau	Terlaksananya pembinaan kepada para anggota untuk mengelola hutan secara lestari guna mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau	
	7) menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30%	Menerus	Kementerian Kehutanan	- Melaksanakan inventarisasi luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau - Memfasilitasi pengembangan hutan rakyat dan penghijauan untuk menambah luas hutan. - Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan	- Terlaksananya inventarisasi luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau - Terfasilitasinya pengembangan hutan rakyat dan penghijauan untuk menambah luas hutan. - Terlaksananya reboisasi dan rehabilitasi hutan	Terwujudnya kawasan hutan dan penutupan vegetasi minimal 30 % pada DAS atau pulau
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman keras	Terlaksananya optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman keras	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penambahan luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau sesuai kewenangan	Terlaksananya penambahan luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau sesuai kewenangan	
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada para anggota untuk berperan serta melaksanakan program pemerintah dalam menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS	Terlaksananya pembinaan kepada para anggota untuk berperan serta melaksanakan program pemerintah dalam menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran MDGs sekurang-kurangnya 69% pada tahun 2015 dengan cara :					
	1) meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan , terutama yang berada di kawasan permukiman	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun pedoman penetapan sempadan sumber air dan pemanfaatan ruangnya - Menetapkan sempadan sumber air pada WS lintas negara, WS lintas provinsi dan WS strategis nasional - Melaksanakan penertiban dan pengawasan penggunaan sempadan sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah. - Membangun prasarana pelindung sempadan sumber air pada lokasi yang memerlukan.	- Tersusunnya pedoman penetapan sempadan sumber air dan pemanfaatan ruangnya - Ditetapkannya sempadan sumber air pada WS lintas negara, WS lintas provinsi dan WS strategis nasional - Terlaksananya penertiban dan pengawasan penggunaan sempadan sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah. - Tersedianya prasarana pelindung sempadan sumber air pada lokasi yang memerlukan.	Terwujudnya perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan , terutama yang berada di kawasan permukiman



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Dalam Negeri	- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air - Menerbitkan surat edaran menteri terkait perlindungan dan pelestarian sumber air	- Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air - Terbitnya surat edaran menteri terkait perlindungan dan pelestarian sumber air.	
			Kementerian Perhubungan	- Melaksanakan pemeliharaan alur transportasi sungai sesuai kewenangan - Melaksanakan pembinaan dalam perlindungan sumber air dari kerusakan akibat kegiatan transportasi sungai dan danau sesuai kewenangan	- Terlaksananya pemeliharaan alur transportasi sungai sesuai kewenangan - Terlaksananya pembinaan dalam perlindungan sumber air dari kerusakan akibat kegiatan transportasi sesuai kewenangan	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air dari kegiatan industri dan komersial lainnya, kegiatan usaha skala kecil, domestik dan jasa melalui kegiatan : - Menyediakan informasi DayaTampung Beban Pencemaran (DTBP) sungai prioritas	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air dari kegiatan industri dan komersial lainnya, kegiatan usaha skala kecil, domestik dan jasa melalui kegiatan : - Tersedianya informasi DTBP sungai prioritas	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun baku mutu air limbah berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Menyusun pedoman teknis perijinan pengelolaan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Mengembangkan percontohan pengendalian pencemaran air - Menetapkan standar pelayanan minimal kabupaten/kota untuk perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)	- Tersusunnya baku mutu air limbah berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Tersusunnya pedoman teknis perijinan pengelolaan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa - Terlaksananya pengembangan percontohan pengendalian pencemaran air - Ditetapkannya standar pelayanan minimal kabupaten/kota untuk perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan usaha tani sesuai kaidah konservasi untuk melindungi sumber air pada lahan pertanian	Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan usaha tani sesuai kaidah konservasi untuk melindungi sumber air pada lahan pertanian	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada para pemilik kepentingan	Terlaksananya strategi STBM kepada para pemilik kepentingan	
			Kementerian Kehutanan	- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan di kawasan hutan lindung - Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan - Memberi masukan terhadap pengaturan pemanfaatan air dan energi air pada kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung.	- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan di kawasan hutan lindung - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan - Tersampainya masukan terhadap pengaturan pemanfaatan air dan energi air pada kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung.	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun pedoman pengelolaan sempadan mata air serta kawasan lindung imbuhan air tanah - Melaksanakan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam pengelolaan sempadan mata air dan pengelolaan kawasan lindung imbuhan air tanah	- Tersusunnya pedoman pengelolaan sempadan mata air serta kawasan lindung imbuhan air tanah - Terlaksananya koordinasi dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam pengelolaan sempadan mata air dan pengelolaan kawasan lindung imbuhan air tanah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan	Tersedianya informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan sesuai kewenangan	Terlaksananya perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan sesuai kewenangan	
			KAI	- Melaksanakan dialog antarpemilik kepentingan terkait upaya perlindungan dan pelestarian sumber air - Menyampaikan hasil dialog antarpemilik kepentingan kepada instansi dan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang SDA	- Terlaksananya dialog antarpemilik kepentingan terkait upaya perlindungan dan pelestarian sumber air - Tersampainya hasil dialog antarpemilik kepentingan kepada instansi dan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang SDA	
			JKPA	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang diprakarsai oleh Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang diprakarsai oleh Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Pemerintah Daerah	
			YAAE	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan daerah sempadan sumber air	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan daerah sempadan sumber air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			PSDA WATCH	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk menanam pohon di sempadan sungai	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menanam pohon di sempadan sungai	
			YGN	- Melaksanakan pendampingan dalam pembangunan drainase di sepanjang sempadan sungai - Membangun tampungan air - Melaksanakan pengelolaan kawasan situ secara swakarsa dan swakarya masyarakat lokal	- Terlaksananya pendampingan dalam pembangunan drainase di sepanjang sempadan sungai - Terbangunnya tampungan air - Terlaksananya pengelolaan kawasan situ secara swakarsa dan swakarya masyarakat lokal	
			TELAPAK	Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian SDA	Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian SDA	
			RTMB	Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat lokal dalam melindungi dan melestarikan sumber air di kawasan pemukiman sekitar hutan	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat lokal dalam melindungi dan melestarikan sumber air di kawasan pemukiman sekitar hutan	
			APHI	Meningkatkan sistem pemantauan air sungai untuk mengetahui debit air sungai, tingkat pencemaran air, erosi dan sedimentasi untuk perlindungan dan pelestarian sumber air	Meningkatnya sistem pemantauan air sungai untuk mengetahui debit air sungai, tingkat pencemaran air, erosi dan sedimentasi untuk perlindungan dan pelestarian sumber air	
			KNI-BB	Memberikan dukungan kepada pengelola bendungan dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pelestarian waduk termasuk daerah sempadan	Diterimanya dukungan kepada pengelola bendungan dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pelestarian waduk termasuk daerah sempadan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	2) Meningkatkan pengendalian izin dan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk perizinan penambangan pada kawasan lindung sumber air	Terlaksananya penyusunan rekomendasi teknis untuk perizinan penambangan pada kawasan lindung sumber air	Terwujudnya penggunaan kawasan lindung sumber air dan hutan lindung sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi penerapan izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	
			Kementerian Kehutanan	Meningkatkan pengendalian terhadap penggunaan hutan lindung	Meningkatnya pengendalian terhadap penggunaan hutan lindung	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	Terlaksananya inventarisasi dan evaluasi kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	
			Pemerintah Daerah	- Mengatur dan menetapkan izin penambangan berdasarkan rekomendasi teknis sesuai kewenangan. - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air sesuai kewenangan	- Diatur dan ditetapkan izin penambangan berdasarkan rekomendasi teknis sesuai Kewenangan. - Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air sesuai kewenangan	
			IMA	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perizinan dalam kegiatan penambangan	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perizinan dalam kegiatan penambangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	3) menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana SDA melalui peraturan perundang-undangan	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan kajian untuk penataan daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan Melaksanakan penataan ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan	Terlaksananya kajian untuk penataan daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan Terlaksananya penataan ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan	Tertatanya daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan
			Pemerintah Daerah	Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang sempadan sumber air sesuai kewenangan	Ditetapkan dan terawasinya pelaksanaan peraturan daerah tentang sempadan sumber air sesuai kewenangan	
	4) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun dan menetapkan peraturan tentang pengembangan kawasan yang memperhatikan peningkatan kapasitas resapan air Menyebarkan informasi mengenai kebutuhan kawasan yang berfungsi sebagai resapan air berdasarkan Pola Pengelolaan SDA	Tersusun dan ditetapkannya peraturan tentang pengembangan kawasan yang memperhatikan peningkatan kapasitas resapan air Terlaksananya penyebaran informasi mengenai kebutuhan kawasan yang berfungsi sebagai resapan air berdasarkan Pola Pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap aspek lingkungan hidup dalam pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap aspek lingkungan hidup dalam pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam peningkatan kapasitas resapan air, khususnya di kawasan lindung imbuhan air tanah	Terlaksananya koordinasi dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam peningkatan kapasitas resapan air, khususnya di kawasan lindung imbuhan air tanah	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan pada kawasan resapan air	Tersedianya informasi curah hujan pada kawasan resapan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42-

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menyusun dan menetapkan peraturan tentang pengembangan kawasan yang memperhatikan peningkatan kapasitas resapan air sesuai kewenangan	Tersusun dan ditetapkan peraturan tentang pengembangan kawasan yang memperhatikan peningkatan kapasitas resapan air sesuai kewenangan	
c	meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara :					
	1) mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pengendalian pemanfaatan sumber air	Terfasilitasinya penyelesaian masalah dalam pengendalian pemanfaatan sumber air	Terkendalnya pemanfaatan sumber air yang sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatannya.
			Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah	Terlaksananya penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan dan menerapkan peraturan tentang pengendalian pemanfaatan sumber air	Ditetapkan dan diterapkannya peraturan tentang pengendalian pemanfaatan sumber air	
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk mentaati dan mengawasi pemanfaatan sumber air agar sesuai dengan zona pemanfaatannya.	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk mentaati dan mengawasi pemanfaatan sumber air agar sesuai dengan zona pemanfaatannya.	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	2) Menetapkan Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir	2 Thn setelah Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi instansi terkait untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pengembang kawasan dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi instansi terkait untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pengembang kawasan dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi	Terwujudnya penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan sosialisasi pedoman tentang kewajiban penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan	Tersusun, ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi pedoman tentang kewajiban penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Memberi masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi	Diterimanya masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi	
			Kementerian Kesehatan	Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lingkungan Menetapkan Pedoman Pelaksanaan STBM. Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan STBM kepada pengembang kawasan pemukiman	- Tersusunnya peraturan perundang - undangan di bidang kesehatan lingkungan - Ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan STBM. - Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan STBM kepada pengembang kawasan pemukiman	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan peraturan pelaksanaan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi sesuai kewenangan	Ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
2.	Peningkatan Upaya Pengawetan Air					
a	meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan, oleh para pemilik kepentingan dgn cara :					
	1) meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	- Menetapkan pedoman pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung - Melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kegiatan pemeliharaan waduk dan embung. - Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam operasi dan pemeliharaan prasarana SDA - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan sumber air. Meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian melalui pembangunan embung Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah Menyediakan informasi curah hujan pada kawasan sumber air untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan serta pembangunan waduk dan embung	Ditetapkannya pedoman pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung - Terlaksananya pembangunan dan meningkatnya kegiatan pemeliharaan waduk dan embung. - Terselenggaranya rapat koordinasi dalam operasi dan pemeliharaan prasarana SDA - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan sumber air. Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian melalui pembangunan embung Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah Tersedianya informasi curah hujan pada kawasan sumber air untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan serta pembangunan waduk dan embung	Meningkat dan terpeliharanya keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan waduk dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air.	Terlaksananya pembangunan serta pemeliharaan waduk dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air	
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk membangun dan memelihara embung untuk penyimpanan air	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk membangun dan memelihara embung untuk penyimpanan air	
			KNI-BB	Memberikan dukungan kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pembangunan, pengelolaan, dan rehabilitasi bendungan	Diterimanya dukungan kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pembangunan, pengelolaan, dan rehabilitasi bendungan	
	2) menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan identifikasi keberadaan dan evaluasi fungsi tampungan air - Melaksanakan rehabilitasi tampungan air yang telah mengalami penurunan fungsi	- Terlaksananya identifikasi keberadaan dan evaluasi fungsi tampungan air - Terlaksananya rehabilitasi tampungan air yang telah mengalami penurunan fungsi	Terjaga dan terlindunginya keberadaan dan fungsi serta terehabilitasinya penampung air, baik alami maupun buatan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah yang mengalami kerusakan	Terlaksananya pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah yang mengalami kerusakan	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pembinaan dalam menjaga dan melindungi embung yang dikelola oleh petani	Terlaksananya pembinaan dalam menjaga dan melindungi embung yang dikelola oleh petani	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Melaksanakan pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara - Menyusun dan melaksanakan pedoman penetapan zona perlindungan air tanah di kawasan pemanfaatan air tanah	- Terlaksananya pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara - Tersusun dan terlaksananya pedoman penetapan zona perlindungan air tanah di kawasan pemanfaatan air tanah	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memberi rekomendasi tentang teknologi perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah yang mengalami kerusakan	Tersedianya rekomendasi tentang teknologi perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah yang mengalami kerusakan	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air sesuai kewenangan. - Melaksanakan rehabilitasi sumber air buatan dan alami yang telah mengalami penurunan fungsi sesuai kewenangan	- Terlaksananya penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air sesuai kewenangan. - Terlaksananya rehabilitasi sumber air buatan dan alami yang telah mengalami penurunan fungsi sesuai kewenangan	
			HKTI	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya waduk dan embung untuk penyediaan air pertanian	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan mengenai pentingnya waduk dan embung untuk penyediaan air pertanian	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			PERPAMSI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota yang memanfaatkan waduk dan embung untuk melakukan perlindungan terhadap fungsi dan keberadaannya	Terlaksananya pembinaan kepada anggota yang memanfaatkan waduk dan embung untuk melakukan perlindungan terhadap fungsi dan keberadaannya	
			ASPADIN	Meningkatkan peranserta anggota dalam pemeliharaan embung terkait dengan kegiatan perusahaan air	Meningkatnya peranserta anggota dalam pemeliharaan embung terkait dengan kegiatan perusahaan air	
			IMA	Melaksanakan inventarisasi lokasi tampungan air yang berada di kawasan pertambangan dan memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan SDA	Terlaksananya inventarisasi lokasi tampungan air yang berada di kawasan pertambangan dan memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan SDA	
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota agar tidak menebang pohon di sekitar sumber air	Terlaksananya pembinaan kepada anggota agar tidak menebang pohon di sekitar sumber air	
			KNI-BB	Memberikan dukungan kepada pengelola bendungan dalam merehabilitasi bendungan untuk menjaga fungsi bendungan	Diterimanya dukungan kepada pengelola bendungan dalam merehabilitasi bendungan untuk menjaga fungsi bendungan	
	3) meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air untuk memanen air hujan	Terfasilitasinya pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air untuk memanen air hujan	Meningkatnya ketersediaan air terutama pada musim kemarau melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan upaya replikasi percontohan peningkatan konservasi air melalui pembangunan sumur resapan	Terlaksananya upaya replikasi percontohan peningkatan konservasi air melalui pembangunan sumur resapan	
			Kementerian Pertanian	Kegiatan sama dengan kebijakan B.2.a.1)	Output sama dengan kebijakan B.2.a.1)	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Riset dan Teknologi	Mengkoordinasikan penelitian terkait teknologi pemanenan air hujan	Terlaksananya koordinasi penelitian terkait teknologi pemanenan air hujan	
			Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	Tersedianya informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air dalam rangka memanen air hujan sesuai kewenangan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air dalam rangka memanen air hujan sesuai kewenangan	
	4) melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi pedoman pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi pedoman pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya pengawetan air oleh masyarakat dan dunia usaha.
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan sosialisasi pedoman pemanfaatan air hujan dalam upaya pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi pedoman pemanfaatan air hujan dalam upaya pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis kawasan industri tentang kewajiban mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk pengawetan air	Terlaksananya sosialisasi pedoman teknis kawasan industri tentang kewajiban mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk pengawetan air	
			Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha terkait air tanah	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha terkait air tanah	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan sosialisasi mengenai teknologi pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi mengenai teknologi pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Melaksanakan sosialisasi mengenai hasil penelitian teknologi pengawetan air	Terlaksananya sosialisasi mengenai hasil penelitian teknologi pengawetan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangan	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangan	
b	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan , dgn cara:					
	1) menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun, menetapkan dan melaksanakan sosialisasi tentang pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air - Melaksanakan ketentuan tarif progresif berdasarkan pedoman	- Tersusun, ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air - Terlaksananya ketentuan tarif progresif berdasarkan pedoman	Terciptanya sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyampaikan masukan untuk penyusunan pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air	Tersampainya masukan untuk penyusunan pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pengguna air tanah - Melaksanakan sosialisasi sistem insentif dan disinsentif	- Tersusunnya sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pengguna air tanah - Terlaksananya sosialisasi sistem insentif dan disinsentif	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan peraturan tentang sistem tarif progresif dalam penggunaan air sesuai kewenangan	Ditetapkannya peraturan tentang sistem tarif progresif dalam penggunaan air sesuai kewenangan	
			PERPAMSI	Menerapkan sistem tarif progresif kepada para pelanggan PDAM	Diterapkannya sistem tarif progresif kepada para pelanggan PDAM	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	2) mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun pedoman penggunaan teknologi daur ulang air limbah	Tersusunnya pedoman penggunaan teknologi daur ulang air limbah	Meningkatnya penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun pedoman tentang pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi daur ulang air limbah - Memberi penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi daur ulang	- Tersusunnya pedoman tentang pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi daur ulang air limbah - Diterimanya penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi daur ulang	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan sosialisasi penggunaan teknologi 3R dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya sosialisasi penggunaan teknologi 3R dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dan fasilitas pelayanan kesehatan	
			Kementerian Perindustrian	Memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi daur ulang air limbah sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	Diterimanya penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi daur ulang air limbah sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Menyebarkanluaskan hasil-hasil penelitian tentang teknologi daur ulang air limbah menjadi air baku	Terlaksananya penyebaranluaskan hasil-hasil penelitian tentang teknologi daur ulang air limbah menjadi air baku	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi tentang teknologi daur ulang - Menetapkan peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang	- Terlaksananya sosialisasi tentang teknologi daur ulang - Ditetapkannya peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	3) mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan insentif kepada pengguna air yang menerapkan teknologi hemat air	Tersedianya insentif kepada pengguna air yang menerapkan teknologi hemat air	Terwujudnya pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun pedoman tentang pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi hemat air - Memberi penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi hemat air	- Tersusunnya pedoman tentang pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi hemat air - Diterimanya penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi hemat air	
			Kementerian Perindustrian	Memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi hemat air sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	Diterimanya penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi hemat air sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan pembinaan kepada petani dalam penerapan teknologi hemat air pada budidaya tanaman melalui SRI, SLPTT, dan SLI	Meningkatnya pembinaan kepada petani dalam penerapan teknologi hemat air pada budidaya tanaman melalui SRI, SLPTT, dan SLI	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam penerapan teknologi hemat air bagi penggunaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah yang membidangi ESDM dalam penerapan teknologi hemat air bagi penggunaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi tentang teknologi hemat air - Menetapkan peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air	Terlaksananya sosialisasi tentang teknologi hemat air Ditetapkannya peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air	
			HKTI	Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi penerapan teknologi hemat air dalam budidaya pertanian	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi penerapan teknologi hemat air dalam budidaya pertanian	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	4) mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan <i>karst</i> dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Meningkatkan penyediaan prasarana pendayagunaan air permukaan untuk mengurangi penggunaan air tanah	Meningkatnya penyediaan prasarana pendayagunaan air permukaan untuk mengurangi penggunaan air tanah	Terkendalnya pengambilan air tanah pada CAT yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan <i>karst</i> dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menetapkan zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	Ditetapkannya zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota mengenai daftar CAT kritis - Melaksanakan pengendalian pelaksanaan perizinan pengambilan air tanah pada CAT kritis sesuai kewenangan - Menetapkan zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/ kota	- Terlaksananya sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota mengenai daftar CAT kritis - Terlaksananya pengendalian pelaksanaan perizinan pengambilan air tanah pada CAT kritis sesuai kewenangan - Ditetapkannya zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/ kota	
	5) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	menerus	Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	Terlaksananya upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	Terwujudnya peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan bimbingan teknis kepada petani dalam kegiatan optimasi pemanfaatan lahan	Meningkatnya bimbingan teknis kepada petani dalam kegiatan optimasi pemanfaatan lahan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan pembangunan sumur resapan dan teknologi resapan air	Terlaksananya pembangunan sumur resapan dan teknologi resapan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan inventarisasi rinci pada kawasan imbuhan air tanah yang telah ditetapkan	Terlaksananya inventarisasi rinci pada kawasan imbuhan air tanah yang telah ditetapkan	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memberikan rekomendasi tentang teknologi rehabilitasi untuk peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	Tersedianya rekomendasi tentang teknologi rehabilitasi untuk peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah sesuai kewenangan	Terlaksananya rehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah sesuai kewenangan	
			APHI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk berperan serta dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk berperan serta dalam rehabilitasi hutan dan lahan	
	6) membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang penghematan penggunaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang penghematan penggunaan air tanah	Terkendalnya penggunaan air tanah dan meningkatnya pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan	Terlaksananya evaluasi peraturan daerah tentang pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan	
3.	Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air					
a	Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau		Kementerian Pekerjaan Umum	Menyampaikan masukan dalam penetapan status tropik pada waduk, embung dan danau serta penetapan kelas air pada sungai prioritas	Tersampainya masukan dalam penetapan status tropik pada waduk, embung dan danau serta penetapan kelas air pada sungai prioritas	Tersedianya kualitas air sesuai dengan peruntukannya



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKT	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan pemantauan penerapan standar kualitas air sesuai peruntukannya - Menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau - Menetapkan kelas air pada sungai prioritas	- Terlaksananya pemantauan penerapan standar kualitas air sesuai peruntukannya - Ditetapkannya status tropik pada waduk, embung dan danau - Ditetapkannya kelas air pada sungai prioritas	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memberi masukan tentang kualitas air terkait budidaya perikanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup	Diterimanya masukan tentang kualitas air terkait budidaya perikanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup	
			Pemerintah Daerah	- Menetapkan kelas air pada sungai prioritas sesuai kewenangan - Menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau sesuai kewenangan	- Ditetapkannya kelas air pada sungai prioritas sesuai kewenangan - Ditetapkannya status tropik pada waduk, embung dan danau sesuai kewenangan	
b	meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam pemulihan kualitas air pada sumber air - Melaksanakan perbaikan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam pemulihan kualitas air pada sumber air - Terlaksananya perbaikan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha	Terwujudnya peningkatan dan pemulihan kualitas air pada sumber air sesuai dengan kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air - Berperan aktif dalam koordinasi kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air yang tercemar - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan baku mutu air limbah	- Tersusun pedoman teknis dan melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air - Berperan aktif dalam koordinasi kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air yang tercemar - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan baku mutu air limbah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan penguatan dan pengembangan jejaring kemitraan pengawasan untuk meningkatkan dan memulihkan kualitas air	Terlaksananya penguatan dan pengembangan jejaring kemitraan pengawasan untuk meningkatkan dan memulihkan kualitas air	
			Kementerian Perindustrian	Menyusun kebijakan dan pedoman penggunaan sumber daya air sektor industri	Tersusunnya kebijakan dan pedoman penggunaan sumber daya air sektor industri	
			Pemerintah Daerah	- Mengupayakan dan memantau penerapan standar kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan pada daerah kewenangannya	- Terlaksananya upaya dan pemantauan penerapan standar kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan pada daerah kewenangannya	
				- Memantau status tropik pada waduk, embung dan danau sesuai kewenangan	- Terlaksananya pemantauan status tropik pada waduk, embung dan danau sesuai kewenangan	
				- Melaksanakan perbaikan kualitas air sesuai dengan kelas air dan status tropik yang ditetapkan	- Terlaksananya perbaikan kualitas air sesuai dengan kelas air dan status tropik yang ditetapkan	
			PERPAMSI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk berperan aktif dalam memulihkan kualitas air pada sumber air	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk berperan aktif dalam memulihkan kualitas air pada sumber	
			ASPADIN	Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk menerapkan kewajiban pembangunan dan pengoperasian IPAL serta memantau kualitas air limbah sesuai standar	Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk menerapkan kewajiban pembangunan dan pengoperasian IPAL serta memantau kualitas air limbah sesuai standar	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pegendalian budidaya perikanan keramba atau jaring apung	Terlaksananya sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pegendalian budidaya perikanan keramba atau jaring apung	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
c	menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman teknis inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran air - Mengembangkan dan memfasilitasi replikasi model pengendalian pencemaran air	- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman teknis inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar - Tersusun dan terlaksananya kebijakan pengendalian pencemaran air - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi replikasi model pengendalian pencemaran air	Tersedianya penetapan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri
			Pemerintah Daerah	- Menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri sesuai kewenangan - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran	- Tersusun dan ditetapkan peraturan daerah tentang beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri sesuai kewenangan - Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran	
d	membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri & industri, di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	4 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan pemantauan penerapan pedoman tentang sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman	- Terlaksananya pemantauan penerapan pedoman tentang sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman	Terkelolanya limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri & industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman	- Terlaksananya pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman	
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan industri dan industri di luar kawasan - Membangun percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman dan industri skala kecil	- Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan industri dan industri di luar kawasan - Terbangunnya percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman dan industri skala kecil	
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai dengan ketentuan perizinan	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dalam pembangunan dan pengoperasian IPAL sesuai dengan ketentuan perizinan	
			Pemerintah Daerah	Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri dan industri di luar kawasan	Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri dan industri di luar kawasan	
e	mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terwujudnya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	Memfasilitasi pelaksanaan percontohan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terfasilitasinya pelaksanaan percontohan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	
			Kementerian perindustrian	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	
			Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air tanah	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air tanah	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi perbaikan kualitas air	Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi perbaikan kualitas air	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air sesuai kewenangan	Terfasilitasinya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air sesuai kewenangan	
			KAI	Melaksanakan sosialisasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah tentang teknologi ramah lingkungan dan perbaikan kualitas air	Terlaksananya sosialisasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah tentang teknologi ramah lingkungan dan perbaikan kualitas air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKT	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
f	membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Membangun pos pemantauan kualitas air - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air	- Terbangunnya pos pemantauan kualitas air - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air	Tersedianya sistem pemantauan limbah dan kualitas air
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman teknis pemantauan kualitas air limbah sebelum masuk sumber air - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pemantauan air limbah sebelum masuk sumber air	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pemantauan kualitas air limbah sebelum masuk sumber air - Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pemantauan air limbah sebelum masuk sumber air	
			Kementerian Kesehatan	- Melaksanakan penguatan kapasitas layanan laboratorium uji kualitas air dan lingkungan	- Terlaksananya penguatan kapasitas layanan laboratorium uji kualitas air dan lingkungan	
			Kementerian Perindustrian	- Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis kawasan industri yang mewajibkan setiap pelaku industri melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air - Melaksanakan sosialisasi peningkatan kemampuan pelaku industri dalam melakukan pemantauan air limbah sebelum masuk ke sumber air	- Terlaksananya sosialisasi pedoman teknis kawasan industri yang mewajibkan setiap pelaku industri melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air - Terlaksananya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaku industri dalam melakukan pemantauan air limbah sebelum masuk ke sumber air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memberikan dukungan teknis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam sistem pemantauan limbah	Diterimanya dukungan teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam sistem pemantauan limbah	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Melaksanakan pengembangan sistem pemantauan kualitas air	Terlaksananya pengembangan sistem pemantauan kualitas air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air sesuai kewenangan	Terlaksananya pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air sesuai kewenangan	
g	mengendalikan budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air & daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara bertahap sampai tahun 2014		Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa - Melaksanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air dan penertiban budidaya perikanan sesuai dengan penetapan zona - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah	- Terlaksananya kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa - Terlaksananya penetapan zona pemanfaatan sumber air dan penertiban budidaya perikanan sesuai dengan penetapan zona - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air bekerja sama dengan pemerintah daerah	Terkendalnya budidaya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air & daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman tentang daya tampung beban pencemaran danau dan waduk	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman tentang daya tampung beban pencemaran danau dan waduk	
			Kementerian Kelautan & Perikanan	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha budidaya perikanan karamba atau jaring apung sesuai peruntukannya	Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha budidaya perikanan karamba atau jaring apung sesuai peruntukannya	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan kerjasama pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk budidaya perikanan	Terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk budidaya perikanan	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk dan rawa	- Terlaksananya kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk dan rawa	
				- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air	- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air	
				- Melaksanakan penertiban budidaya perikanan sesuai peruntukan sumber air	- Terlaksananya penertiban budidaya perikanan sesuai peruntukan sumber air	
			HKTI	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada petani pembudidaya ikan tentang teknologi ramah lingkungan untuk budidaya ikan	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada petani pembudidaya ikan tentang teknologi ramah lingkungan untuk budidaya ikan	
			KTNA	- Melaksanakan pembinaan kepada anggota mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang budidaya perikanan keramba atau jaring apung	- Terlaksananya pembinaan kepada anggota mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang budidaya perikanan keramba atau jaring apung	
				- Melaksanakan sosialisasi hasil kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa	- Terlaksananya sosialisasi hasil kajian tentang daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pegendalian budidaya perikanan keramba atau jaring apung	Terlaksananya sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan dalam pegendalian budidaya perikanan keramba atau jaring apung	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
h	memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang	4 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman - Memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyediaan sarana sanitasi umum bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi pedoman penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman - Terfasilitasinya kabupaten/kota dalam penyediaan sarana sanitasi umum bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan	Terwujudnya penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang
			Kementerian Lingkungan Hidup	Membangun percontohan sistem sanitasi komunal di permukiman padat penduduk	Terbangunnya percontohan sistem sanitasi komunal di permukiman padat penduduk	
			Kementerian Kesehatan	Memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku higienis pada kawasan permukiman di dekat atau di atas badan air	Terfasilitasinya pemicuan perubahan perilaku higienis pada kawasan permukiman di dekat atau di atas badan air	
			Pemerintah Daerah	Menyediakan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air	Tersedianya sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

C. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1	Peningkatan Upaya Penatagunaan SDA					
a	menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah & rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara penetapan zona pemanfaatan sumber air dengan RTRW	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara penetapan zona pemanfaatan sumber air dengan RTRW	Terwujudnya zonasi sumber air yang lebih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
			Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan percepatan penetapan zona pemanfaatan sumber air	Terlaksananya percepatan penetapan zona pemanfaatan sumber air	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyiapkan penetapan daya tampung beban pencemaran dan zona pemanfaatan sumber air sesuai dengan kewenangan	Tersedianya penetapan daya tampung beban pencemaran dan zona pemanfaatan sumber air sesuai dengan kewenangan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan informasi zona pemanfaatan air tanah untuk mendukung penyusunan atau perubahan RTRW dan Rencana Pengelolaan SDA	Tersedianya informasi zona pemanfaatan air tanah untuk mendukung penyusunan atau perubahan RTRW dan Rencana Pengelolaan SDA	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan pada zona pemanfaatan sumber air dalam penyusunan atau perubahan RTRW dan Rencana Pengelolaan SDA pada WS	Tersedianya informasi curah hujan pada zona pemanfaatan sumber air dalam penyusunan atau perubahan RTRW dan Rencana Pengelolaan SDA pada WS	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air sesuai kewenangan	Terlaksananya penetapan zona pemanfaatan sumber air sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan percepatan penetapan peruntukan air pada sumber air pada WS lintas negara, WS lintas provinsi dan WS strategis nasional	Terlaksananya percepatan penetapan peruntukan air pada sumber air pada WS lintas negara, WS lintas provinsi dan WS strategis nasional	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Memfasilitasi penetapan peruntukan air pada sungai prioritas - Melaksanakan pelatihan tentang penetapan kelas air pada sungai prioritas	- Terfasilitasinya penetapan peruntukan air pada sungai prioritas - Terlaksananya pelatihan tentang penetapan kelas air pada sungai prioritas	
			Kementerian Pertanian	Menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian	Tersedianya data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penetapan peruntukan air pada sumber air sesuai kewenangan	Terlaksananya penetapan peruntukan air pada sumber air sesuai kewenangan	
c	melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, dengan melibatkan seluruh pemilik kepentingan
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan.	Tersusunnya rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan.	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Menyusun kajian kerentanan adaptasi perubahan iklim tingkat nasional dan daerah - Memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait air	- Tersusunnya kajian kerentanan adaptasi perubahan iklim tingkat nasional dan daerah - Terfasilitasinya penyusunan rencana aksi daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait air	
			Kementerian Pertanian	- Menyusun pedoman teknis Sekolah Lapang Iklim (SLI) dalam rangka adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim - Memasukkan pelaksanaan SLI untuk adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dalam rencana tindak pengelolaan SDA	- Tersusunnya pedoman teknis SLI dalam rangka adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim - Tersedianya pelaksanaan sekolah lapang iklim untuk adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan kerjasama dengan pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan	Terlaksananya kerjasama dengan pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan	
			Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Menyusun rencana pengembangan pengelolaan air tanah untuk peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	Tersusunnya rencana pengembangan pengelolaan air tanah untuk peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi iklim sebagai bahan masukan secara periodik untuk penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA	Tersedianya informasi iklim sebagai bahan masukan secara periodik untuk penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA	
			Pemerintah Daerah	Menyusun rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan	Tersusunnya rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			HKTI	Melaksanakan sosialisasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap kegiatan pertanian	Terlaksananya sosialisasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap kegiatan pertanian	
d	menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan		Kementerian Pekerjaan Umum	- Menetapkan daerah irigasi di dalam RTRW - Mempertahankan daerah irigasi yang sudah tercantum dalam rencana tata ruang	- Ditetapkannya daerah irigasi di dalam RTRW - Terjaganya daerah irigasi yang sudah tercantum dalam rencana tata ruang	Tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan evaluasi tata ruang lingkungan hidup untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan RTRW terkait dengan alih fungsi lahan pertanian	Terlaksananya evaluasi tata ruang lingkungan hidup untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan RTRW terkait dengan alih fungsi lahan pertanian	
			Kementerian Pertanian	Kegiatan sama dengan kebijakan B.1.a.3)	Output sama dengan kebijakan B.1.a.3)	
			Kementerian Perindustrian	- Menyampaikan informasi tentang kebutuhan dan syarat untuk pembangunan kawasan industri sebagai masukan dalam pengalokasian ruang pada RTRW - Melaksanakan sosialisasi tentang kawasan industri kepada pelaku usaha industri	- Tersampainya informasi tentang kebutuhan dan syarat untuk pembangunan kawasan industri sebagai masukan dalam pengalokasian ruang pada RTRW - Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan industri kepada pelaku usaha industri	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengakomodasi lahan pertanian berkelanjutan	Ditetapkannya peraturan daerah tentang RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengakomodasi lahan pertanian berkelanjutan	
			PSDA WATCH	Melaksanakan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya RTRW dalam pembangunan ramah lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat	Terlaksananya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya RTRW dalam pembangunan ramah lingkungan kepada pemerintah dan masyarakat	
2.	Peningkatan Upaya Penyediaan Air					
a	menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai		Kementerian Pekerjaan Umum	Mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air Menetapkan rencana alokasi air pada setiap WS sesuai kewenangan	Terlaksananya percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air Ditetapkannya rencana alokasi air pada setiap WS sesuai kewenangan	Tersedianya ketetapan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai
		Kementerian Pertanian	Menyampaikan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Tersampaikannya informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA		
		Kementerian Perindustrian	Melaksanakan survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri Menyampaikan hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Terlaksananya survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri Tersampaikannya hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA		



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan pedoman penyusunan rencana alokasi /peruntukan air tanah pada CAT berdasarkan data penggunaan air tanah sesuai kewenangan - Menetapkan rencana alokasi /peruntukan air tanah pada CAT lintas provinsi	- Tersusun, ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi pedoman penyusunan rencana alokasi/ peruntukan air tanah pada CAT berdasarkan data penggunaan air tanah pada CAT - Ditetapkannya rencana alokasi / peruntukan air tanah pada CAT lintas provinsi	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya ikan sebagai masukan guna penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Tersampaikannya informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya ikan sebagai masukan guna penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan rencana alokasi air dan hak guna air berdasarkan data penggunaan air	Ditetapkannya rencana alokasi air dan hak guna air berdasarkan data penggunaan air	
			Anggota Dewan Nonpemerintah	Menyampaikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait rencana alokasi dan hak guna air	Tersampaikannya masukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait rencana alokasi dan hak guna air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	memastikan pengelolaan SDA terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi		Kementerian Pekerjaan Umum	- Menetapkan pedoman penyusunan rencana pengelolaan SDA terpadu yang mengakomodasi kebutuhan air bersih dan sanitasi - Menetapkan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA terpadu sesuai dengan pedoman	- Ditetapkannya pedoman penyusunan rencana pengelolaan SDA terpadu yang mengakomodasi kebutuhan air bersih dan sanitasi - Ditetapkannya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA terpadu sesuai dengan pedoman	Terwujudnya pengelolaan SDA terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun pedoman pengelolaan air tanah sesuai dengan pengelolaan SDA terpadu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari air tanah	Tersusunnya pedoman pengelolaan air tanah sesuai dengan pengelolaan SDA terpadu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari air tanah	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA terpadu sesuai kewenangan	Ditetapkannya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA terpadu sesuai kewenangan	
c	mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan		Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	Tersedianya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	- Melaksanakan inventarisasi luas dan sebaran daerah irigasi untuk menentukan kebutuhan air bagi pertanian rakyat , yang terintegrasi dengan kementerian terkait - Melaksanakan audit layanan air pada jaringan irigasi tingkat usaha tani - Melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pemanfaatan air irigasi	- Terlaksananya inventarisasi luas dan sebaran daerah irigasi untuk menentukan kebutuhan air bagi pertanian rakyat , yang terintegrasi dengan kementerian terkait - Terlaksananya audit layanan air pada jaringan irigasi tingkat usaha tani - Terlaksananya pembinaan kepada petani dalam pemanfaatan air irigasi	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui kegiatan pengeboran air tanah di daerah sulit air.	Tersedianya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui kegiatan pengeboran air tanah di daerah sulit air.	
			Pemerintah Daerah	Memprioritaskan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan sesuai kewenangan	Tersedianya penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan sesuai kewenangan	
			LP3ES	Memfasilitasi penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat	Terfasilitasinya penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat	
d	menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional.	Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional.	Tersedianya standar layanan minimal/SPM kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air		Kementerian Kesehatan	Menetapkan persyaratan kualitas air minum dan air untuk keperluan rumah tangga selain air minum	Ditetapkannya persyaratan kualitas air minum dan air untuk keperluan rumah tangga selain air minum	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
3.	Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan SDA					
a	mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan SDA di wilayah sungai (WS)	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memberdayakan unit pengendalian penggunaan SDA di setiap WS	Terlaksananya pemberdayaan unit pengendalian penggunaan SDA di setiap WS	Terwujudnya pengembangan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan SDA di WS
			Kementerian Dalam Negeri	Memfasilitasi dan melaksanakan pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola SDA untuk pengendalian penggunaan SDA berkoordinasi dengan instansi terkait	Terfasilitasi dan terlaksananya pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola SDA untuk pengendalian penggunaan SDA berkoordinasi dengan instansi terkait	
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan kinerja perangkat kelembagaan pengelola air irigasi di tingkat usaha tani.	Meningkatnya kinerja perangkat kelembagaan pengelola air irigasi di tingkat usaha tani.	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan air tanah	Terbentuknya unit pelaksana teknis pengelolaan air tanah	
			Kementerian Kelautan & Perikanan	Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan di daerah di bidang perikanan budidaya	Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan di daerah di bidang perikanan budidaya	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk pengendalian penggunaan SDA di WS	Meningkatnya kapasitas kelembagaan di daerah untuk pengendalian penggunaan SDA di WS	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyampaikan masukan dalam penyusunan kriteria penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Tersampaiannya masukan dalam penyusunan kriteria penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Terjaga dan terlindunginya SDA di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dari penggunaan yang berlebihan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dan penyidikan bersama instansi terkait serta menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada pihak yang berwenang	Terlaksananya pengawasan dan penyidikan bersama instansi terkait serta tersampaiannya laporan hasil penyidikan kepada pihak yang berwenang	
			Kementerian Kehutanan	- Menetapkan peraturan yang memuat kriteria penggunaan SDA agar tidak berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	- Ditetapkannya peraturan yang memuat kriteria penggunaan SDA agar tidak berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	
				- Melaksanakan pengawasan, penyidikan dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	- Terlaksananya pengawasan, penyidikan dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyampaikan masukan dalam penyusunan kriteria penggunaan air tanah yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Tersampaiannya masukan dalam penyusunan kriteria penggunaan air tanah yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai kewenangan - Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS daerah	- Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai kewenangan - Terlaksananya penegakan hukum oleh PPNS daerah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			METI	Menyampaikan masukan dalam rangka penyusunan kriteria penggunaan SDA untuk mikrohidro di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Tersampainya masukan dalam rangka penyusunan kriteria penggunaan SDA untuk mikrohidro di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	
c	meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan teknologi prasarana irigasi yang lebih efisien	Terlaksananya pengembangan teknologi prasarana irigasi yang lebih efisien	Terwujudnya peningkatan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Mengkoordinasikan dan mensinergikan rencana pembangunan terkait dengan efisiensi pemanfaatan air irigasi	Terlaksananya koordinasi dan sinergi rencana pembangunan terkait dengan efisiensi pemanfaatan air irigasi	
			Kementerian Dalam Negeri	- Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang efisiensi dalam penggunaan air - Menerbitkan surat edaran menteri mengenai efisiensi penggunaan air.	- Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang efisiensi dalam penggunaan air - Terbitnya surat edaran menteri mengenai efisiensi penggunaan air.	
			Kementerian Pertanian	Kegiatan sama dengan kebijakan B.2.b.3	Output sama dengan kebijakan B.2.b.3	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap penggunaan air tanah untuk irigasi pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	Terlaksananya evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap penggunaan air tanah untuk irigasi pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Melaksanakan penyebarluasan hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan tanaman hemat air	Terlaksananya penyebarluasan hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan tanaman hemat air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemberdayaan kepada pengguna air irigasi melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka efisiensi penggunaan air irigasi	Terlaksananya pemberdayaan kepada pengguna air irigasi melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka efisiensi penggunaan air irigasi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			HKTI/KTNA	Menyelenggarakan sosialisasi hemat air dalam budidaya pertanian	Terselenggaranya sosialisasi hemat air dalam budidaya pertanian	
			ASBINDO	Menyelenggarakan sosialisasi hemat air dalam budidaya hortikultura	Terselenggaranya sosialisasi hemat air dalam budidaya hortikultura	
			PERPAMSI	Melaksanakan pembinaan kepada anggota tentang pengurangan tingkat kebocoran dalam perusahaan air minum	Terlaksananya pembinaan kepada anggota tentang pengurangan tingkat kebocoran dalam perusahaan air minum	
			LP3ES	Melaksanakan pemberdayaan petani pemakai air irigasi dan kelembagaannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi	Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi dan kelembagaannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi	
			METI	Menyampaikan saran dan masukan kepada pengguna air irigasi tentang pendayagunaan potensi energi dari jaringan irigasi	Tersampaikannya saran dan masukan kepada pengguna air irigasi tentang pendayagunaan potensi energi dari jaringan irigasi	
4.	Peningkatan Upaya Pengembangan SDA					
a	menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai	1 thn setelah rencana PSDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Tersedianya program pengembangan SDA sesuai tugas dan fungsi lembaga masing-masing yang didasarkan pada rencana pengelolaan SDA WS yang bersangkutan.
			BAPPENAS	Menyelaraskan program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan SDA	Terlaksananya keselarasan program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan SDA	
			Kementerian Dalam Negeri	Melaksanakan fasilitasi kepada daerah dalam penyusunan program tahunan pengembangan SDA, yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya fasilitasi kepada daerah dalam penyusunan program tahunan pengembangan SDA, yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyusunan program pengembangan SDA terkait dengan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan SDA terkait dengan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan penyusunan program bidang pertanian untuk mendukung pengembangan SDA	Terlaksananya penyusunan program bidang pertanian untuk mendukung pengembangan SDA	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan penyusunan program bidang kehutanan untuk mendukung pengembangan SDA	Terlaksananya penyusunan program bidang kehutanan untuk mendukung pengembangan SDA	
			Kementerian Perhubungan	Menyusun cetak biru pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Tersusunnya cetak biru pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	
			Kementerian Perindustrian	Kegiatan sama dengan kebijakan C.2.a	Output sama dengan kebijakan C.2.a	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan penyusunan program pengembangan air tanah berdasarkan Rencana Pengelolaan Air Tanah dan RTRW yang terkoordinasi dengan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan air tanah berdasarkan Rencana Pengelolaan Air Tanah dan RTRW yang terkoordinasi dengan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan penyusunan program pengembangan budidaya perikanan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan budidaya perikanan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan penyusunan program penelitian dan pengembangan SDA	Terlaksananya penyusunan program penelitian dan pengembangan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan masukan dalam penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Diterimanya masukan dalam penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi iklim untuk mendukung penyusunan program pengembangan SDA	Tersedianya informasi iklim untuk mendukung penyusunan program pengembangan SDA	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS sesuai kewenangan	Terlaksananya penyusunan program pengembangan SDA berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS sesuai kewenangan	
b	melaksanakan program pengembangan SDA dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dgn tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program terpadu pengembangan SDA oleh kementerian dan lembaga terkait dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	Terlaksananya koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program terpadu pengembangan SDA oleh kementerian dan lembaga terkait dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDA dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDA dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pengembangan SDA di daerah sesuai kewenangan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pengembangan SDA di daerah sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
c	mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri	Terwujudnya sistem air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan air baku dari sumber air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri sesuai kewenangan	Terlaksananya pengembangan prasarana dan sarana penyediaan air baku dari sumber air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri sesuai kewenangan	
d	melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 78 % layanan di perkotaan dan 62% layanan di perdesaan pada tahun 2015	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil	Terwujudnya peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat
			Kementerian Kesehatan	- Melaksanakan metode pendekatan partisipatif untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi (<i>Methodology Participatory Approach-Participatory Hygiene and Sanitation Transformation /MPA-PHAST</i>) dan STBM - Melaksanakan pengawasan kualitas air minum secara eksternal sesuai peraturan Menteri Kesehatan	- Terlaksananya metode pendekatan partisipatif untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi (<i>Methodology Participatory Approach-Participatory Hygiene and Sanitation Transformation /MPA-PHAST</i>) dan STBM - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum secara eksternal sesuai peraturan Menteri Kesehatan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengeboran air tanah di daerah sulit air untuk penyediaan air bersih	Terlaksananya pengeboran air tanah di daerah sulit air untuk penyediaan air bersih	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil	
			ASPADIN	Melaksanakan penyediaan air bersih untuk keperluan air minum bagi masyarakat sekitar wilayah operasi pabrik, dalam bentuk fasilitas dan penyertaan biaya pengadaan fasilitas air minum	Terlaksananya penyediaan air bersih untuk keperluan air minum bagi masyarakat sekitar wilayah operasi pabrik, dalam bentuk fasilitas dan penyertaan biaya pengadaan fasilitas air minum	
			PERPAMSI	Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi anggota untuk membuat rencana pengembangan sistem penyediaan air minum lima tahunan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan	Terlaksananya pembinaan dan terfasilitasinya anggota untuk membuat rencana pengembangan sistem penyediaan air minum lima tahunan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan	
e	meningkatkan pengembangan SDA termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan jaringan irigasi termasuk jaringan irigasi dengan sumber air irigasi alternatif	Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi termasuk jaringan irigasi dengan sumber air irigasi alternatif	Meningkatnya pengembangan SDA termasuk sumber air irigasi alternatif untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya
			Kementerian Pertanian	Mengembangkan pemanfaatan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil untuk kegiatan budidaya pertanian	Terlaksananya pengembangan pemanfaatan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil untuk kegiatan budidaya pertanian	
			Kementerian Kelautan & Perikanan	Menyampaikan informasi tentang kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan budidaya ikan, tambak garam, dan pengolahan hasil perikanan	Tersampainya informasi tentang kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan budidaya ikan, tambak garam, dan pengolahan hasil perikanan	
			BMKG	Menyediakan informasi iklim pada kawasan pengembangan sumber air irigasi	Tersedianya informasi iklim pada kawasan pengembangan sumber air irigasi	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
f	mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian	Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait dalam mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan PLTA pada WS yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi	Melaksanakan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dalam mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan PLTA pada WS yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi	Meningkatnya fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai
			Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	Terlaksananya pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	
			Kementerian Perhubungan	Melaksanakan penataan, pelebaran, dan pengerukan alur sungai dan danau dengan mengutamakan aspek keselamatan operasional transportasi air nasional	Terlaksananya penataan, pelebaran, dan pengerukan alur sungai dan danau dengan mengutamakan aspek keselamatan operasional transportasi air nasional	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan survei potensi SDA dan penelitian untuk pembangunan PLTA	Terlaksananya survei potensi SDA dan penelitian untuk pembangunan PLTA	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan informasi tentang kebutuhan pemeliharaan fungsi muara sungai untuk keperluan lalu lintas kapal nelayan	Tersampainya informasi tentang kebutuhan pemeliharaan fungsi muara sungai untuk keperluan lalu lintas kapal nelayan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	Terlaksananya pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			METI	Memfasilitasi kegiatan survei, studi kelayakan, pembiayaan, dan pembangunan PLTMH	Terfasilitasinya kegiatan survei, studi kelayakan, pembiayaan, dan pembangunan PLTMH	
			GAPASDAP	Menyediakan dan melaksanakan transportasi sungai, danau dan waduk untuk kepentingan masyarakat dan pelaku usaha	Tersedia dan terlaksananya transportasi sungai, danau dan waduk untuk kepentingan masyarakat dan pelaku usaha	
			KNI-BB	Memberikan dukungan kepada para pemilik bendungan dalam mengembangkan fungsi waduk dan/atau embung untuk keperluan PLTA dan transportasi air	Diterimanya dukungan kepada para pemilik bendungan dalam mengembangkan fungsi waduk dan/atau embung untuk keperluan PLTA dan transportasi air	
g	menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH	Tersedianya informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH	Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melakukan usaha swadaya dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro.
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH	Tersedianya informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Memberikan bantuan teknologi dan bimbingan teknis pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTMH kepada masyarakat	Tersedianya bantuan teknologi dan bimbingan teknis pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTMH kepada masyarakat	
			Pemerintah Daerah	Memberikan stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan infrastruktur PLTMH sesuai kewenangan	Tersedianya stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan infrastruktur PLTMH sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
h	mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan	Terwujudnya pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari air permukaan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi hemat air tanah	Terlaksananya sosialisasi hemat air tanah	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan penyediaan teknologi pengolahan air minum dari bahan baku air laut	Terlaksananya penyediaan teknologi pengolahan air minum dari bahan baku air laut	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan model teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan serta pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan model teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Melaksanakan penyebarluasan teknologi pengolahan air minum dari sumber air permukaan	Terlaksananya penyebarluasan teknologi pengolahan air minum dari sumber air permukaan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pelatihan dan bantuan untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan sesuai kewenangan	Terlaksananya pelatihan dan bantuan untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
i	menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air	Terfasilitasinya persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air	Terlaksananya penerapan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan pengembangan teknologi modifikasi cuaca	Terlaksananya pengembangan teknologi modifikasi cuaca	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi cuaca untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca	Tersedianya informasi cuaca untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air di daerah	Terfasilitasinya persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air di daerah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
5.	Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air					
a	mengatur pengusahaan SDA berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan SDA	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan SDA	Terwujudnya pengaturan pengusahaan SDA berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi
			Kementerian Lingkungan Hidup	Mengevaluasi kegiatan/usaha pemanfaatan SDA, baik yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk masukan pengaturan pengusahaan SDA	Terlaksananya evaluasi kegiatan/usaha pemanfaatan SDA, baik yang wajib AMDAL maupun UKL/ UPL untuk masukan pengaturan pengusahaan SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan SDA - Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan SDA sesuai kewenangan	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan SDA - Terlaksananya pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan SDA sesuai kewenangan	
b	menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan SDA yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun NSPK dalam pengusahaan SDA - Melaksanakan sosialisasi NSPK kepada pemerintah daerah - Mengawasi penerapan NSPK	- Tersusunnya NSPK dalam pengusahaan SDA - Terlaksananya sosialisasi NSPK kepada pemerintah daerah - Terlaksananya pengawasan penerapan NSPK	Terwujudnya pengusahaan SDA yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun, mensosialisasikan dan mengawasi penerapan NSPK dalam pengusahaan air tanah	Tersusun, tersosialisasikan dan terawasinya penerapan NSPK dalam pengusahaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengendalian pengusahaan SDA di daerah sesuai dengan NSPK	Terlaksananya pengendalian pengusahaan SDA di daerah sesuai dengan NSPK	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 - 85 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			PERPAMSI/ ASPADIN	- Menyampaikan masukan dalam proses penyusunan NSPK - Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kelompok masyarakat lokal dalam penerapan NSPK	- Tersampaikannya masukan dalam proses penyusunan NSPK - Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan kelompok masyarakat lokal dalam penerapan NSPK	
			SKEPHI/YGN / LP3ES	Menyampaikan masukan dalam proses penyusunan NSPK agar mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	Tersampaikannya masukan dalam proses penyusunan NSPK agar mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	
c	meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA dengan izin pengusahaan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Meningkatkan layanan dalam perizinan pengusahaan SDA sesuai peraturan perundangan-undangan.	Meningkatnya layanan dalam perizinan pengusahaan SDA sesuai peraturan perundangan-	Meningkatnya peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA dengan izin pengusahaan
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi pedoman perizinan tentang pengusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi pedoman perizinan tentang pengusahaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan layanan dalam perizinan pengusahaan SDA sesuai kewenangan	Meningkatnya layanan dalam perizinan pengusahaan SDA sesuai kewenangan	
			PERPAMSI	Melaksanakan sosialisasi kepada para anggota tentang kewajiban memiliki izin pengusahaan SDA untuk air minum	Terlaksananya sosialisasi kepada para anggota tentang kewajiban memiliki izin pengusahaan SDA untuk air minum	
			ASPADIN	- Melaksanakan pembinaan kepada anggota untuk membuat kajian komprehensif tentang rencana pengusahaan air sebagai syarat permohonan izin pengusahaan air	- Terlaksananya pembinaan kepada anggota untuk membuat kajian komprehensif tentang rencana pengusahaan air sebagai syarat permohonan izin pengusahaan air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Membangun kemitraan yang saling menguntungkan antarpemilik kepentingan dalam perusahaan SDA. - Membangun jaringan informasi antara pelaku usaha dengan masyarakat dalam perusahaan SDA	- Terbangunnya kemitraan yang saling menguntungkan antarpemilik kepentingan dalam perusahaan SDA. - Terbangunnya jaringan informasi antara pelaku usaha dengan masyarakat dalam perusahaan SDA	
			APPATINDO	Melaksanakan sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin perusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin perusahaan air tanah	
			LP3ES	Mengembangkan model peranserta masyarakat dalam perusahaan SDA	Terlaksananya pengembangan model peranserta masyarakat dalam perusahaan SDA	
			RTMB	Menfasilitasi pengembangan model perusahaan SDA yang partisipatif untuk pengelolaan wisata air bagi perseorangan, badan usaha dan LSM	Terfasilitasinya pengembangan model perusahaan SDA yang partisipatif untuk pengelolaan wisata air bagi perseorangan, badan usaha dan LSM	
			IMA	Melaksanakan sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin penggunaan SDA untuk usaha pertambangan	Terlaksananya sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin penggunaan SDA untuk usaha pertambangan	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin perusahaan SDA	Terlaksananya sosialisasi kepada para anggota tentang pentingnya izin perusahaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
d	menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian SDA dan lingkungan sekitar	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	Terlaksananya penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	Terkendalinya penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian SDA dan lingkungan sekitar
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyampaikan masukan untuk penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	Tersampainya masukan untuk penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	
			Pemerintah Daerah	Menyusun peraturan daerah tentang pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	Tersusunnya peraturan daerah tentang pengendalian penambangan bahan galian pada sumber air	
e	mengalokasikan kebutuhan air untuk perusahaan SDA sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menetapkan dan melaksanakan rencana alokasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan air pada setiap sumber air untuk perusahaan SDA	Ditetapkan dan terlaksananya rencana alokasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan air pada setiap sumber air untuk perusahaan SDA	Teralokasikannya kebutuhan air untuk perusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan data dan informasi potensi air tanah sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi/ peruntukan kebutuhan air untuk perusahaan air tanah	Tersedianya data dan informasi potensi air tanah sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi/ peruntukan kebutuhan air untuk perusahaan air tanah	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi kebutuhan air untuk perusahaan SDA	Tersedianya informasi curah hujan sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi kebutuhan air untuk perusahaan SDA	
			Pemerintah Daerah	Menetapkan dan melaksanakan rencana alokasi kebutuhan air pada setiap sumber air untuk perusahaan SDA	Ditetapkan dan terlaksananya rencana alokasi kebutuhan air pada setiap sumber air untuk perusahaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
f	mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan SDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan SDA	Terwujudnya pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL	
			Kemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan air tanah	Terlaksananya pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap perusahaan SDA dengan melibatkan masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap perusahaan SDA dengan melibatkan masyarakat	
			Anggota Dewan Non Pemerintah	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap perusahaan SDA	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap perusahaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

D. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1	Peningkatan Upaya Pencegahan					
a	memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai (WS)		Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun pedoman untuk penetapan kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan - Menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan pada WS lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional	- Tersusunnya pedoman untuk penetapan kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan - Ditetapkannya kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan pada WS lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional.	Tersusunnya peta kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap WS
		Kementerian Lingkungan Hidup	Menyampaikan informasi tentang kerusakan lahan untuk masukan dalam penetapan kawasan rawan bencana banjir dan longsor	Tersampaiakannya informasi tentang kerusakan lahan untuk masukan dalam penetapan kawasan rawan bencana banjir dan longsor		
		Kementerian Pertanian	Menyusun cetak biru pengelolaan banjir dan kekeringan di kawasan budidaya pertanian	Tersusunnya cetak biru pengelolaan banjir dan kekeringan di kawasan budidaya pertanian		
		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menetapkan zona rawan bencana geologi terkait air sebagai acuan dalam penyusunan dan perubahan RTRW serta pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap WS	Ditetapkannya zona rawan bencana geologi terkait air sebagai acuan dalam penyusunan dan perubahan RTRW serta pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap WS		
		Kementerian Kelautan dan perikanan	Menyampaikan informasi tentang sentra perikanan yang rawan bencana banjir untuk masukan bagi penetapan peta rawan bencana	Tersampaiakannya informasi tentang sentra perikanan yang rawan bencana banjir untuk masukan bagi penetapan peta rawan bencana		
		Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi tentang hidrometeorologi untuk masukan dalam penetapan daerah rawan banjir dan kekeringan	Tersedianya informasi tentang hidrometeorologi untuk masukan dalam penetapan daerah rawan banjir dan kekeringan		



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan pada WS lintas kabupaten/kota dan WS dalam kabupaten/kota	Ditetapkannya kawasan rawan bencana banjir dan kekeringan pada WS lintas kabupaten/kota dan WS dalam kabupaten/kota	
b	mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan koordinasi untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai	Terlaksananya koordinasi untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai	Terintegrasinya perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir	Tersedianya informasi curah hujan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengintegrasian perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	Terlaksananya pengintegrasian perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	
c	meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan - Menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi serta pelatihan tentang adaptasi dalam menghadapi banjir dan kekeringan - Menyediakan sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	- Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan - Tersusunnya pedoman dan terlaksananya sosialisasi serta pelatihan tentang adaptasi dalam menghadapi banjir dan kekeringan - Tersedianya sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	Meningkatnya kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dan kekeringan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan di kawasan budidaya pertanian	Terlaksananya sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan di kawasan budidaya pertanian	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyebarkan informasi tentang keterkaitan intensitas curah hujan terhadap kejadian banjir dan kekeringan	Terlaksananya penyebaran informasi tentang keterkaitan intensitas curah hujan terhadap kejadian banjir dan kekeringan	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan sesuai kewenangan	- Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan sesuai kewenangan	
				- Melaksanakan sosialisasi pedoman dan pelatihan dalam menghadapi banjir dan kekeringan	- Terlaksananya sosialisasi pedoman dan pelatihan dalam menghadapi banjir dan kekeringan	
			KAI	- Menyediakan sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	- Tersedianya sarana dan prasarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	
				Menyelenggarakan dialog antarpemilik kepentingan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat di kawasan rawan banjir dan kekeringan	Terselenggaranya dialog antarpemilik kepentingan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat di kawasan rawan banjir dan kekeringan	
			YAAE	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan serta cara menghadapi banjir dan kekeringan	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan serta cara menghadapi banjir dan kekeringan	
			YGN	Melaksanakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepekaan masyarakat terhadap bahaya banjir dan kekeringan	Terlaksananya sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepekaan masyarakat terhadap bahaya banjir dan kekeringan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
d	memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi dan/atau melaksanakan pembentukan pola kerjasama pada wilayah yang belum memiliki wadah koordinasi pada tingkat provinsi dan WS - Memfasilitasi pelaksanaan pola kerjasama yang efektif dalam wadah koordinasi	- Terfasilitasinya dan/atau terlaksananya pembentukan pola kerjasama pada wilayah yang belum memiliki wadah koordinasi pada tingkat provinsi dan WS - Terfasilitasinya pelaksanaan pola kerjasama yang efektif dalam wadah koordinasi	Terbentuknya pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air
			Kementerian Dalam Negeri	- Menyusun pedoman pola kerjasama antara daerah hulu dan hilir dalam pengendalian daya rusak air - Melakukan fasilitasi pembentukan pola kerjasama antara daerah hulu dan hilir.	- Tersusunnya pedoman pola kerjasama antara daerah hulu dan hilir dalam pengendalian daya rusak air - Terlaksananya fasilitasi pembentukan pola kerjasama antara daerah hulu dan hilir.	
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Memfasilitasi pembentukan pola kerjasama antardaerah terutama kawasan hulu dan hilir dalam pengelolaan lingkungan - Memfasilitasi pelaksanaan pola kerjasama dalam pengelolaan lingkungan	- Terfasilitasinya pembentukan pola kerjasama antardaerah terutama kawasan hulu dan hilir dalam pengelolaan lingkungan - Terfasilitasinya pelaksanaan pola kerjasama dalam pengelolaan lingkungan	
			Kementerian Pertanian	Memfasilitasi pembentukan pola kerjasama antara pelaku usaha tani di kawasan hulu dengan para penerima manfaat pengendalian banjir di kawasan hilir	Terfasilitasinya pembentukan pola kerjasama antara pelaku usaha tani di kawasan hulu dengan para penerima manfaat pengendalian banjir di kawasan hilir	
			Kementerian Kehutanan	- Melaksanakan koordinasi antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan di hulu dan hilir untuk pengendalian daya rusak air Memfasilitasi dan/atau melaksanakan kerjasama antara kawasan hulu dan kawasan hilir	- Terlaksananya koordinasi antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan di hulu dan hilir untuk pengendalian daya rusak air - Terfasilitasinya dan terlaksananya kerjasama antara kawasan hulu dan kawasan hilir	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dalam pengelolaan CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	Terlaksananya koordinasi antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dalam pengelolaan CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan pola kerjasama pada wilayah yang belum memiliki wadah koordinasi	Terfasilitasinya pembentukan dan pelaksanaan pola kerjasama pada wilayah yang belum memiliki wadah koordinasi	
			Anggota Dewan Non pemerintah	Memprakarsai kerjasama antarpemilik kepentingan di kawasan hulu dan hilir dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hasil pelaksanaan program konservasi SDA	Terlaksananya prakarsa kerjasama antarpemilik kepentingan di kawasan hulu dan hilir dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hasil pelaksanaan program konservasi SDA	
e	meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Memelihara fungsi hutan di area sabuk hijau waduk dan sempadan sumber air	Tepeliharanya fungsi hutan di area sabuk hijau waduk dan sempadan sumber air	Meningkatnya dan terjaganya kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan sesuai dengan kewenangan	Terlaksananya program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan sesuai dengan kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			ASPADIN	Memberdayakan anggota untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan.	Terlaksananya pemberdayaan anggota untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	
			KAI	Menyelenggarakan percontohan penanaman pohon bakau dikawasan hutan bakau	Terlaksananya penyelenggaraan percontohan penanaman pohon bakau dikawasan hutan bakau	
			SKEPHI/APHI / YGN/ RTMB, dan LSM terkait	- Berperanserta dalam pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan dan menjaga pelestarian hutan - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mengenai kondisi hutan	- Terlaksananya peranserta dalam pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan dan menjaga pelestarian hutan - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi mengenai kondisi hutan	
			IMA	Melaksanakan prinsip pertambangan ramah lingkungan (green mining) untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya prinsip pertambangan ramah lingkungan (green mining) untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	
f	meningkatkan kesadaran masyarakat dgn cara : 1) mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan bantaran sungai - Melaksanakan penertiban pemanfaatan bantaran sungai bekerjasama dengan pemerintah daerah	- Tersusunnya pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai - Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan bantaran sungai - Terlaksananya penertiban pemanfaatan bantaran sungai bekerjasama dengan pemerintah daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak bermukim di bantaran dan sempadan sungai dalam rangka menjaga kelestarian fungsi bantaran sungai dan penertiban sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai sesuai kewenangan	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Terlaksananya penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai sesuai kewenangan	
	2) menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun pedoman tentang penggunaan sempadan sungai - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang penggunaan sempadan sungai - Melaksanakan penertiban penggunaan sempadan sungai bekerjasama dengan pemerintah daerah	- Tersusunnya pedoman tentang penggunaan sempadan sungai - Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang penggunaan sempadan sungai - Terlaksananya penertiban penggunaan sempadan sungai bekerjasama dengan pemerintah daerah	
			Pemerintah Daerah	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai sesuai kewenangan	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai - Terlaksananya penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan bantaran dan penggunaan sempadan sungai sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	3) meningkatkan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Mengintensifkan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi secara intensif mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Tersebar nya informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan penyebaran informasi mengenai penanganan penyakit pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi mengenai penanganan penyakit pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan penyebaran informasi tentang intensitas curah hujan pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi tentang intensitas curah hujan pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	
			HKTI	Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tani untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan antisipasi terhadap bencana terkait air	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat tani untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan antisipasi terhadap bencana terkait air	
			KAI	Menyelenggarakan dialog antarpemilik kepentingan mengenai kesadaran masyarakat di kawasan rawan bencana terkait air	Terselenggaranya dialog antarpemilik kepentingan mengenai kesadaran masyarakat di kawasan rawan bencana terkait air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			YGN	Menyebarluaskan informasi daerah rawan banjir melalui multi media	Terlaksananya penyebaran informasi daerah rawan banjir melalui multi media	
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik bendungan dan pengelola bendungan mengenai kawasan rawan bencana terkait kemungkinan kegagalan bendungan berdasarkan rencana tindak darurat	Terlaksananya sosialisasi kepada para pemilik bendungan dan pengelola bendungan mengenai kawasan rawan bencana terkait kemungkinan kegagalan bendungan	
	4) meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Mengintensifkan penyebaran informasi mengenai potensi dampak perubahan iklim global - Mengintensifkan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi potensi daya rusak	- Terlaksananya penyebaran informasi secara intensif mengenai potensi dampak perubahan iklim global - Terlaksananya sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi potensi daya rusak secara intensif -	Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan roadmap adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan yang terkait air dengan cara : - Pemantauan penyakit akibat perubahan iklim; - Penyebarluasan hasil pemantauan kepada para pemilik kepentingan - Perbaikan kualitas lingkungan	Terlaksananya roadmap adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan yang terkait air dengan cara : - Pemantauan penyakit akibat perubahan iklim; - Penyebarluasan hasil pemantauan kepada para pemilik kepentingan - Perbaikan kualitas lingkungan -	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim	
			KAI	Menyelenggarakan pelatihan metoda penulisan masalah (tool box) mengenai penanggulangan bencana terkait air kepada pemilik kepentingan dari sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.	Terselenggaranya pelatihan metoda penulisan masalah (tool box) mengenai penanggulangan bencana terkait air kepada pemilik kepentingan dari sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.	
			YAAE	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bencana terkait air dan potensi dampak perubahan iklim global	Tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang bencana terkait air dan potensi dampak perubahan iklim global	
			YGN	Menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan iklim global	Tersampaikannya informasi kepada masyarakat terkait perubahan iklim global	
			TELAPAK	- Menyebarkan informasi tentang potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air - Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat	- Tersebaranya informasi tentang potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat	
			RTMB	Melaksanakan koordinasi para pihak terkait dalam penyebaran informasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.	Terlaksananya koordinasi para pihak terkait dalam penyebaran informasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 99 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			KNI-BB	Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi kepada para pemilik dan pengelola bendungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	
g	melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara :					
	1) meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi mengenai upaya peningkatan resapan air ke dalam tanah yang dapat dilakukan oleh masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi mengenai upaya peningkatan resapan air ke dalam tanah yang dapat dilakukan oleh masyarakat.	Meningkatnya resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembuatan model percontohan sumur resapan dan lubang resapan biopori	Terlaksananya pembuatan model percontohan sumur resapan dan lubang resapan biopori	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat petani untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat petani untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan tentang pengendalian aliran permukaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di dalam dan disekitar kawasan hutan	Terlaksananya sosialisasi, dan penyuluhan tentang pengendalian aliran permukaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di dalam dan disekitar kawasan hutan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 100-

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi kepada pemilik kepentingan tentang sistem imbuhan air tanah	Tersusunnya pedoman dan terlaksananya sosialisasi kepada pemilik kepentingan tentang sistem imbuhan air tanah	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan kerjasama dengan para pihak dalam penerapan hasil pengembangan teknologi imbuhan buatan untuk mengendalikan air permukaan	Terlaksananya kerjasama dengan para pihak dalam penerapan hasil pengembangan teknologi imbuhan buatan untuk mengendalikan air permukaan	
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan dan kelembaban tanah dalam meningkatkan resapan air	Tersedianya informasi curah hujan dan kelembaban tanah dalam meningkatkan resapan air	
			Pemerintah Daerah	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi peraturan daerah yang mendukung upaya peningkatan resapan air - Mengembangkan program percontohan sumur resapan dan biopori - Melaksanakan penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi peraturan daerah yang mendukung upaya peningkatan resapan air - Terlaksananya pengembangan program percontohan sumur resapan dan biopori - Terlaksananya penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan	
			JKPA	Melaksanakan sosialisasi program pembuatan rorak di lahan budidaya pertanian dan perkebunan	Terlaksananya sosialisasi program pembuatan rorak di lahan budidaya pertanian dan perkebunan	
			YAAE	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan resapan air	Tersampainya informasi kepada masyarakat tentang pembuatan resapan air	
			YGN	Menyelenggarakan gerakan masyarakat dalam pembuatan kolam tampungan, sumur resapan dan lubang biopori	Terselenggaranya gerakan masyarakat dalam pembuatan kolam tampungan, sumur resapan dan lubang biopori	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	2) meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air untuk meningkatkan kapasitas pengaliran air	Terlaksananya normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air untuk meningkatkan kapasitas pengaliran air	Meningkatnya kapasitas pengaliran sungai dan saluran air.
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan penilaian kota bersih dengan memasukkan faktor pemeliharaan sungai sebagai salah satu kriteria	Terlaksananya penilaian kota bersih dengan memasukkan faktor pemeliharaan sungai sebagai salah satu kriteria	
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan sebagai pertimbangan dalam upaya meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air	Tersedianya informasi curah hujan sebagai pertimbangan dalam upaya meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air untuk meningkatkan kapasitas pengaliran air sesuai kewenangan	Terlaksananya normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air untuk meningkatkan kapasitas pengaliran air sesuai kewenangan	
	3) menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penetapan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	Terlaksananya penetapan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	Ditetapkannya kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menyediakan peta rawan banjir dan prediksi daerah potensi banjir sebagai masukan dalam upaya pengendalian banjir	Tersedianya peta rawan banjir dan prediksi daerah potensi banjir sebagai masukan dalam upaya pengendalian banjir	
			Pemerintah Daerah	Menyusun peraturan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	Tersusunnya peraturan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	4) mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir.	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir.	Terjaganya kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Memberdayakan masyarakat dalam mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir melalui membangun model percontohan konservasi air di daerah tangkapan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir melalui membangun model percontohan konservasi air di daerah tangkapan	
			Kementerian Kehutanan	- Menetapkan dan menjaga kawasan hutan yang memiliki fungsi retensi banjir - Melaksanakan penyuluhan mengenai fungsi retensi banjir di kawasan hutan kepada para pemilik kepentingan	- Ditetapkan dan terjaganya kawasan hutan yang memiliki fungsi retensi banjir - Terlaksananya penyuluhan mengenai fungsi retensi banjir di kawasan hutan kepada para pemilik kepentingan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan tentang kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir	
			YGN/KAI/ ASPADIN dan LSM terkait	- Melaksanakan penghijauan di kawasan hulu dan hilir DAS - Berperan aktif dalam melestarikan daerah terbuka hijau, hutan kota, situ dan danau - Melaksanakan pembersihan sungai dari sampah	- Terlaksananya penghijauan di kawasan hulu dan hilir DAS - Terselenggaranya peran aktif dalam melestarikan daerah terbuka hijau, hutan kota, situ dan danau - Terlaksananya pembersihan sungai dari sampah	

ME
NT
ER
I
KO
OR
DI
NA
TO
R
BI
DA
NG
PE
RE
KO
NO
MI
AN
RE
PU
BLI
K
IN
DO
NE
SIA



103 –

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
	5) menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Terkendalnya banjir di kawasan permukiman dan kawasan produktif.
			Kementerian Pertanian	Membina dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran irigasi tersier di kawasan budidaya pertanian	Terbina dan terlaksananya kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran irigasi tersier di kawasan budidaya pertanian	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif dan sipil teknik untuk pengendalian aliran permukaan	Terlaksananya RHL secara vegetatif dan sipil teknik untuk pengendalian aliran permukaan	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendali banjir	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendali banjir	

MEN
TERI
KOO
RDIN

ATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 –

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
2.	Peningkatan Upaya Penanggulangan					
a	menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air permukaan	Tersusun dan ditetapkan SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air permukaan.	Tersedianya acuan formal mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang dipahami oleh para pemilik kepentingan
			Pemerintah Daerah	Menyusun dan menetapkan SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangan	Tersusun dan ditetapkan SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangan	



b	melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air permukaan.	Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air permukaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	
			KAI	Melaksanakan dialog antarpemilik kepentingan dalam penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air	Terlaksananya dialog antarpemilik kepentingan dalam penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air	
			JKPA	Meneruskan informasi lokasi daerah rawan bencana akibat daya rusak air kepada sektor terkait	Tersampainya informasi lokasi daerah rawan bencana akibat daya rusak air kepada sektor terkait	
			YAAE	Melaksanakan sosialisasi lewat rapat, pertemuan pada anggota organisasi dan pelatihan kepada para petugas, tentang cara penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi lewat rapat, pertemuan pada anggota organisasi dan pelatihan kepada para petugas, tentang cara penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air	
			YGN	Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan terkait dengan penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan terkait dengan penanggulangan bencana akibat daya rusak air	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
c	mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Mengembangkan dan menerapkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya pengembangan dan penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	Tersedianya sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap



	kawasan rawan bencana terkait air		Kementerian Pertanian	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada budidaya pertanian	Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada budidaya pertanian	kawasan rawan bencana terkait air
			Kementerian Kehutanan	- Membangun stasiun pengamat arus sungai (SPAS) telemetri di kawasan hutan di wilayah hulu DAS untuk keperluan prakiraaan dan peringatan dini - Melaksanakan pemantauan SPAS dan menyampaikan informasi kepada instansi pengelola sungai	- Terbangunnya SPAS telemetri di kawasan hutan di wilayah hulu DAS untuk keperluan prakiraaan dan peringatan dini - Terlaksananya pemantauan SPAS dan menyampaikan informasi kepada instansi pengelola sungai	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Melaksanakan pemantauan muka air tanah dan kualitas air tanah - Mencegah pengambilan air tanah pada zona rusak dan mengurangi pengambilan air tanah pada zona kritis	- Terlaksananya pemantauan muka air tanah dan kualitas air tanah - Telaksananya pencegahan penga mbilan air tanah pada zona rusak dan mengurangi pengambilan air tanah pada zona kritis	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam penerapan hasil pengembangan teknologi sistem peringatan dini	Terlaksananya kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam penerapan hasil pengembangan teknologi sistem peringatan dini	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyediakan informasi cuaca dan iklim ekstrim dan prakiraan daerah potensi banjir	Tersedianya informasi cuaca dan iklim ekstrim dan prakiraan daerah potensi banjir	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	- Melaksanakan pengembangan sistem peringatan dini bencana daya rusak air melalui penetapan parameter kunci kualitas dan kuantitas air - Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi sistem prakiraan dan peringatan dini bencana terkait air	- Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini bencana daya rusak air melalui penetapan parameter kunci kualitas dan kuantitas air - Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi sistem prakiraan dan peringatan dini bencana terkait air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	Terlaksananya sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	
d	meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara - cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Meningkatnya pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan praktek kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air di bidang kesehatan	Terlaksananya sosialisasi, simulasi, dan praktek kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air di bidang kesehatan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun modul dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin	Tersusunnya modul dan terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat tentang kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi pada masyarakat tentang kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air	
			HKTI	Membentuk satuan tugas penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terbentuknya satuan tugas penang gulan bencana akibat daya rusak air	
			KAI	Menyelenggarakan dialog antarpemilik kepentingan mengenai kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air	Terselenggaranya dialog antarpemilik kepentingan mengenai kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air	
			YAAE	Melaksanakan sosialisasi tentang cara penanggulangan keadaan darurat terkait bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat	Terlaksananya sosialisasi tentang cara penanggulangan keadaan darurat terkait bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat	
			YGN	- Menyebarkan mengenai pengetahuan tanggap bencana akibat daya rusak air melalui multi media informasi kepada masyarakat - Melaksanakan simulasi dan peragaan mengenai cara-cara penanggulangan bencana	- Terlaksananya penyebaran mengenai pengetahuan tanggap bencana akibat daya rusak air melalui multi media informasi kepada masyarakat - Terlaksananya simulasi dan pera gaan mengenai cara-cara penang gulan bencana	
e	memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan perbaikan sistem untuk mening katkan efektifitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air - Meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	- Terlaksananya perbaikan sistem untuk meningkatkan efektifitas penang gulan bencana akibat daya rusak air - Meningkatnya kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terwujudnya kinerja yang baik dalam penanggulangan bencana akibat daya rusak air



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan perbaikan sistem penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah yang berbasis konservasi	Terlaksananya perbaikan sistem penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah yang berbasis konservasi	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penerapan teknologi penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait dalam penerapan teknologi penanggulangan bencana akibat daya rusak air	
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Meningkatkan peranserta dan melaksanakan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	Meningkatnya peranserta dan terlaksananya koordinasi dengan BNPB untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan kemampuan dan pendayagunaan sumber daya daerah untuk peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Meningkatnya kemampuan dan pendayagunaan sumber daya daerah untuk peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	
f	menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana APBN dan/ atau APBD serta sumber dana lain	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun sistem penganggaran sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air	Terlaksananya koordinasi kementerian/lembaga terkait untuk menyusun sistem penganggaran sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air	Tersedianya sistem penganggaran untuk mengalokasikan dana penanggulangan kondisi darurat
			Kementerian Pekerjaan Umum	Memberikan masukan untuk penyusunan sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat	diterimanya masukan untuk penyusunan sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat	
			Pemerintah Daerah	Mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air dari dana APBD dan sumber dana lain	Teralokasinya anggaran untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air dari dana APBD dan sumber dana lain	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
3.	Peningkatan Upaya Pemulihan					
a	merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya		Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah	Menyusun program dan anggaran serta melaksanakannya sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air serta pemulihan fungsi lingkungan Mengalokasikan dana untuk perbaikan jaringan sumur pantau dan pembuatan sumur imbuhan Menyusun dan melaksanakan program dengan alokasi dana yang cukup dan sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air serta pemulihan fungsi lingkungan	Tersusunnya program dan anggaran serta melaksanakannya sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air serta pemulihan fungsi lingkungan Tersedianya alokasi dana untuk perbaikan jaringan sumur pantau dan pembuatan sumur imbuhan Tersusun dan terlaksananya program dengan alokasi dana yang cukup dan sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air serta pemulihan fungsi lingkungan	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai kewenangan dengan alokasi dana yang cukup
b	mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air - Menyusun rencana pemulihan kualitas lingkungan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha - Menyampaikan rekomendasi rencana pemulihan kualitas lingkungan kepada kementerian/lembaga terkait dan masyarakat korban bencana	Tersusunnya model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air - Tersusunnya rencana pemulihan kualitas lingkungan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha - Tersampainya rekomendasi rencana pemulihan kualitas lingkungan kepada kementerian/lembaga terkait dan masyarakat korban bencana	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kesehatan	Menjalin kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air	Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air tanah	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melibatkan masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangan	Terlaksananya pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan bencana akibat daya rusak air sesuai kewenangan	
			ASPADIN	Memberdayakan anggota untuk melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pemulihan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya pemberdayaan anggota untuk melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pemulihan bencana akibat daya rusak air	
			Anggota Dewan Non Pemerintah	Berperanserta dalam konsultasi publik dan terlibat secara terkoordinasi dalam kegiatan pemulihan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya peranserta dalam konsultasi publik dan terlibat secara terkoordinasi dalam kegiatan pemulihan bencana akibat daya rusak air	
c	memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan		Kementerian Kesehatan	Melaksanakan pemulihan dampak psikologis terhadap para korban bencana terkait air	Terlaksananya pemulihan dampak psikologis terhadap para korban bencana terkait air	Pulihnya dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis	Terlaksananya peranserta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemulihan dampak sosial dan psikologis terhadap para korban bencana terkait air	Terlaksananya pemulihan dampak sosial dan psikologis terhadap para korban bencana terkait air	
			Anggota Dewan Non pemerintah	Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam mengatasi dampak sosial dan psikologis pasca bencana terkait air	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam mengatasi dampak sosial dan psikologis pasca bencana terkait air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

E. KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SDA

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan					
a	meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepedulian masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi dan kampanye kepedulian masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	Meningkatnya pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kepedulian publik mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.	Terlaksananya sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kepedulian publik mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pola budidaya pertanian ramah lingkungan untuk keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pola budidaya pertanian ramah lingkungan untuk keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri dalam menyelaraskan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	Terlaksananya pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri dalam menyelaraskan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepedulian publik terhadap air tanah	Terlaksananya sosialisasi dan kampanye kepedulian publik terhadap air tanah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup terkait SDA	Terlaksananya sosialisasi mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup terkait SDA	
			GAPKINDO	- Menerapkan standar kebutuhan air untuk proses produksi - Melaksanakan sosialisasi penghematan penggunaan air melalui penerapan 3R	- Diterapkannya standar kebutuhan air untuk proses produksi - Terlaksananya sosialisasi penghematan penggunaan air melalui penerapan 3R	
			KAI	Menyelenggarakan kampanye peduli air yang mencakup pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat dalam pengelolaan SDA terpadu	Terselenggaranya kampanye peduli air yang mencakup pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat dalam pengelolaan SDA terpadu	
			SKEPHI	Menyelenggarakan sosialisasi dan mengembangkan berbagai forum multi pihak dalam pengelolaan hutan	Terselenggaranya sosialisasi dan terlaksananya pengembangan berbagai forum multi pihak dalam pengelolaan hutan	
			METI	Menyelenggarakan sosialisasi tentang energi air sebelum pembangunan PLTMH	Terselenggaranya sosialisasi tentang energi air sebelum pembangunan PLTMH	
			APHI	Melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada anggota dan pemanfaat hasil hutan tentang pengelolaan hutan lestari	Terlaksananya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada anggota dan pemanfaat hasil hutan tentang pengelolaan hutan lestari	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam wadah koordinasi pengelolaan SDA	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam wadah koordinasi pengelolaan SDA	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA
			Kementerian Kesehatan	Membangun jejaring kerjasama dengan pemilik kepentingan untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Terbangunnya jejaring kerjasama dengan pemilik kepentingan untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA terkait kesehatan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan konsultasi publik sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah	Terlaksananya konsultasi publik sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan keterlibatan lembaga pendidikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	Meningkatnya keterlibatan lembaga pendidikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	
			Pemerintah Daerah	Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	Terlaksananya pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	
			SKEPHI/ APhi	Melaksanakan kajian dan memberi masukan tentang kehutanan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	Terlaksananya kajian dan tersampainya masukan tentang kehutanan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	
			METI	Menghimpun masukan dari masyarakat dan dunia usaha pengguna energi listrik tenaga mikro hidro dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	Terhimpunnya masukan dari masyarakat dan dunia usaha pengguna energi listrik tenaga mikro hidro dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
c	meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat wilayah sungai (WS)	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola serta rencana pengelolaan SDA tingkat WS melalui wadah koordinasi pengelolaan SDA	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola serta rencana pengelolaan SDA tingkat WS melalui wadah koordinasi pengelolaan SDA	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS
			Kementerian Kehutanan	Meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor kehutanan dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	Meningkatnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor kehutanan dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi dengan dinas yang membidangi ESDM di daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan terkait air tanah	Terlaksananya koordinasi dengan dinas yang membidangi ESDM di daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan terkait air tanah	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS	Meningkatnya peran lembaga pendidikan dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA melalui wadah koordinasi pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewenangan daerah	Terlaksananya konsultasi publik dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA melalui wadah koordinasi pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewenangan daerah	
			METI	Menghimpun masukan masyarakat dan dunia usaha pengguna energi listrik tenaga mikro hidro dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	Terhimpunnya masukan masyarakat dan dunia usaha pengguna energi listrik tenaga mikro hidro dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			APHI	Meningkatkan peranserta anggota dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	Meningkatnya peranserta anggota dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS	
d	meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA.	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA.	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan air tanah.	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan air tanah.	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat	Meningkatnya peran lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperanserta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperanserta dalam perencanaan pengelolaan SDA	
			JIKPA/ SKEPHI/ TELAPAK	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperanserta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperanserta dalam perencanaan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
2.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan					
a	membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA
			Kementerian Dalam Negeri	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terkait SDA	Terlaksananya konsultasi publik untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terkait SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.	Terlaksananya konsultasi publik untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah	
			Pemerintah Daerah	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Anggota Dewan Non pemerintah	Menghimpun masukan tentang pelaksanaan pengelolaan SDA dengan menyelenggarakan dialog antarpemilik kepentingan	Terhimpunnya masukan tentang pelaksanaan pengelolaan SDA dengan menyelenggarakan dialog antarpemilik kepentingan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
b	memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman tentang peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	- Tersusun dan terlaksananya sosialisasi pedoman tentang peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan - Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pemberdayaan yang partisipatif dan responsif gender kepada petani pemakai air dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Terlaksananya pemberdayaan yang partisipatif dan responsif gender kepada petani pemakai air dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi prasarana air tanah serta operasi dan pemeliharaan sesuai dengan pedoman	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi prasarana air tanah serta operasi dan pemeliharaan sesuai dengan pedoman	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			SKEPHI	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan	
c	mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun pedoman dan prosedur serta melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersusunnya pedoman dan prosedur serta terlaksananya sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA	Meningkatkan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan kajian valuasi ekonomi lingkungan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan tentang kontribusi pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya kajian valuasi ekonomi lingkungan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan tentang kontribusi pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Kementerian Kehutanan	- Menyusun peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pelaksanaan pengelolaan SDA - Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	- Tersusunnya peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pelaksanaan pengelolaan SDA - Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Memfasilitasi peranserta masyarakat dan dunia usaha melalui penyediaan data dan informasi pengelolaan air tanah serta memprakarsai terbentuknya pola kerjasama pembiayaan dengan instansi terkait	Terfasilitasinya peranserta masyarakat dan dunia usaha melalui penyediaan data dan informasi pengelolaan air tanah serta terlaksananya prakarsa pembentukan pola kerjasama pembiayaan dengan instansi terkait	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi peranserta masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA	Terfasilitasinya peranserta masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Anggota Dewan Non pemerintah	- Menyampaikan masukan dalam penyusunan pedoman dan prosedur bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan bidang kegiatan - Memfasilitasi pengumpulan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha pada pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan bidang kegiatan	- Tersampainya masukan dalam penyusunan pedoman dan prosedur bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan bidang kegiatan - Terfasilitasinya pengumpulan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha pada pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan bidang kegiatan	
d	meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun dan menerapkan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air	Tersusun dan diterapkannya mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air	Meningkatnya motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun pedoman pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi - Memberi penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperanserta dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air tanah.	- Tersusunnya pedoman pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi - Diterimanya penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperanserta dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air tanah.	
			Pemerintah Daerah	Menerapkan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi	Diterapkannya mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi	
			SKEPHI	- Menyampaikan masukan dalam penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi - Memotivasi masyarakat dalam kegiatan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air - Memberi insentif kepada masyarakat yang berprestasi dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air	- Tersampainya masukan dalam penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi - Termotivasinya masyarakat dalam kegiatan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air - Diterimanya insentif kepada masyarakat yang berprestasi dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air	
e	menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait dalam penyiapan kebijakan atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya koordinasi Kementerian dan lembaga terkait dalam penyiapan kebijakan atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Diterapkannya instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun dan mensosialisasikan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersusun dan tersosialisasikannya instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkaitan dengan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Tersusunnya kebijakan perencanaan pembangunan berkaitan dengan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan tentang pengelolaan kualitas air yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	Tersusun dan tersosialisasinya kebijakan dan/atau peraturan tentang pengelolaan kualitas air yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Perindustrian	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat pelaku industri dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat pelaku industri dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan tentang air tanah yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	Tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan dan/atau peraturan tentang air tanah yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Anggota Dewan Nonpemerintah	Menyampaikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan kelompok sasaran masing-masing	Tersampainya masukan dalam penyusunan kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan kelompok sasaran masing-masing	
f	mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terwujudnya keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.	Terlaksananya koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya koordinasi antarpemilik kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			SKEPHI	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara terpadu dalam pengelolaan SDA	
			APHI	Meningkatkan peran anggota dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya peran anggota dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari	
g	meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat agar memahami dan mampu melaksanakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat agar memahami dan mampu melaksanakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan SDA.
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA terkait lingkungan hidup	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA terkait lingkungan hidup	
			Kementerian Pertanian	Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sekolah lapang serta penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air irigasi	Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sekolah lapang serta penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air irigasi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA terkait kesehatan	
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat di kawasan dan sekitar hutan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat di kawasan dan sekitar hutan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Menyusun materi ajar untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersusunnya materi ajar untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menyampaikan masukan untuk penyusunan materi pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait	Tersampainya masukan untuk penyusunan materi pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait	
			Pemerintah Daerah	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			KAI/ SKEPHI	Melaksanakan penyusunan materi pembelajaran dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya penyusunan materi pembelajaran dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			PSDA WATCH	Melaksanakan kajian dan pelatihan tentang peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya kajian dan pelatihan tentang peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			YGN	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	
			LP3ES	Melaksanakan kajian, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya kajian, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			TELAPAK	- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA - Membentuk dan mengembangkan usaha berbasis masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	- Terlaksananya pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA - Terbentuk dan terlaksananya pengembangan usaha berbasis masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			METI	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan masyarakat pengelola PLTMH dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan masyarakat pengelola PLTMH dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	
			APHI	Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat tentang peran hutan dalam menjaga fungsi hidroorologis.	Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat tentang peran hutan dalam menjaga fungsi hidroorologis.	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
3.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan					
a	membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk pelaporan dan pengaduan	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk pelaporan dan pengaduan
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	
			Kementerian Dalam Negeri	- Menyediakan fasilitas portal pengaduan berbasis web - Menyediakan kotak pengaduan masyarakat (Kotak Pos 5001)	- Tersedianya fasilitas portal pengaduan berbasis web - Tersedianya kotak pengaduan masyarakat (Kotak Pos 5001)	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Pertanian	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	
			Kementerian Kesehatan	Menyediakan pos pengaduan masyarakat untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan	Tersedianya pos pengaduan masyarakat untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kehutanan	Menyediakan unit layanan untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	Tersedianya unit layanan untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	
			Kementerian Perhubungan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari dunia usaha terkait pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari dunia usaha terkait pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi	
			Kementerian Perindustrian	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri terkait pengelolaan SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri terkait pengelolaan SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait perikanan dan kelautan	Tersedianya fasilitas untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait transportasi sungai dan danau	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait teknologi pengelolaan SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait teknologi pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menyediakan sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai kewenangan	Tersedianya sistem untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai kewenangan	
			Anggota Dewan Non pemerintah	- Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun laporan dan pengaduan - Menyampaikan laporan serta pengaduan dari anggota dan masyarakat kepada instansi yang berwenang terkait pengelolaan SDA	- Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun laporan dan pengaduan - Tersampainya laporan serta pengaduan dari anggota dan masyarakat kepada instansi yang berwenang terkait pengelolaan SDA yang berwenang terkait pengelolaan SDA	
b	menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	- Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	- Ditetapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	Ditetapkan dan dipahaminya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA
			Kementerian Dalam Negeri	Menyusun dan menetapkan prosedur pengawasan untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	Ditetapkannya prosedur pengawasan untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	
			Kementerian Kesehatan	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	
			Kementerian Kehutanan	- Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	- Ditetapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	
			Kementerian Perindustrian	- Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengawasan pengelolaan SDA	- Ditetapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengawasan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan air tanah	- Ditetapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan air tanah	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	- Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait perikanan dan kelautan	- Ditetapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait perikanan dan kelautan	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan terkait teknologi pengelolaan SDA	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan terkait teknologi pengelolaan SDA	
			Pemerintah Daerah	Menerapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai kewenangan	Diterapkan dan tersosialisasinya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai kewenangan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Anggota Dewan Non pemerintah	Melaksanakan sosialisasi prosedur pelaporan dan pengaduan kepada para anggota dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Terlaksananya sosialisasi prosedur pelaporan dan pengaduan kepada para anggota dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	
c	menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha	Ditindaklanjutinya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Dalam Negeri	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA untuk mendapatkan solusi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Kesehatan	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Kehutanan	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan kawasan hutan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan kawasan hutan untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Perhubungan	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yg disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait transportasi air	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yg disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait transportasi air	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Perindustrian	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait perikanan dan kelautan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait perikanan dan kelautan untuk mendapatkan solusi	
			Kementerian Riset dan Teknologi	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia terkait teknologi pengelolaan SDA untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia terkait teknologi pengelolaan SDA untuk mendapatkan solusi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat dan dunia usaha di daerah untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat dan dunia usaha di daerah untuk mendapatkan solusi	
d	meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar memahami dan mampu dalam pengawasan pengelolaan SDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar memahami dan mampu dalam pengawasan pengelolaan SDA	Meningkatnya kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Terlaksananya pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kehutanan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kehutanan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kehutanan	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan kerjasama dengan dinas yang membidangi ESDM dalam pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengawasan pengelolaan air tanah	Terlaksananya kerjasama dengan dinas yang membidangi ESDM dalam pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengawasan pengelolaan air tanah	
			Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menyelenggarakan sekolah lapang iklim untuk petani dan petambak garam	Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk petani dan petambak garam	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA di daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA di daerah	
			KAI/ SKEPHI	Menyusun materi pembelajaran dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Tersusunnya materi pembelajaran dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 137 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			YGN	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	
			TELAPAK	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	
			APHI	Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan dalam pengawasan pengelolaan SDA	Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan dalam pengawasan pengelolaan SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

F. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA) DALAM PENGELOLAAN SDA NASIONAL TERPADU

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
1.	Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA					
a	menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi SDA	1 thn stlh Jaknas Pengel SIH3 di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan WS	Terlaksananya penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan WS	Tertatanya pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi SDA
			Kementerian Kesehatan	Menyediakan data dan informasi kualitas air minum	Tersedianya data dan informasi kualitas air minum	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan penataan ulang tugas dan fungsi kelompok kerja pengelola data dan informasi hidrogeologi.	Terlaksananya penataan ulang tugas dan fungsi kelompok kerja pengelola data dan informasi hidrogeologi.	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan penataan ulang dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi di tingkat nasional dan daerah	Terlaksananya penataan ulang dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi di tingkat nasional dan daerah	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu	Terlaksananya penataan dan pengaturan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu	
b	meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3	menerus	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA	Terkoordinasikannya kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA	Meningkatnya ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3
			Kementerian Pekerjaan Umum	Menyusun program dengan alokasi anggaran yang meningkat untuk mengembangkan SISDA	Tersusunnya program dengan alokasi anggaran yang meningkat untuk mengembangkan SISDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatkan penyediaan alokasi dana terkait SISDA	Meningkatnya penyediaan alokasi dana terkait SISDA	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrogeologi	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrogeologi	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	
			Pemerintah Daerah	Menyusun program dan alokasi anggaran guna meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA	Tersusunnya program dan alokasi anggaran guna meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA	
c	membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai	2 thn stlh Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pembentukan dan/atau pengembangan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat nasional dan wilayah sungai	Terlaksananya pembentukan dan/atau pengembangan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat nasional dan wilayah sungai	Terbentuk dan berkembangnya instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pembentukan dan pengembangan kelompok kerja pengelola data dan informasi air tanah di tingkat nasional.	Terlaksananya pembentukan dan pengembangan kelompok kerja pengelola data dan informasi air tanah di tingkat nasional.	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan pembentukan dan pengembangan kelompok kerja pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya pembentukan dan pengembangan kelompok kerja pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pembentukan dan pengembangan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu	Terlaksananya pembentukan dan pengembangan instansi pengelola data dan informasi SDA terpadu	
d	meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas lingkungan terkait SDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Kesehatan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas air minum	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas air minum	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi	
			Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan	
e	meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA
			Kementerian Lingkungan Hidup	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Perindustrian	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat pelaku industri	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat pelaku industri	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
				- Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat pelaku industri dalam pengelolaan data dan informasi SDA	- Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat pelaku industri dalam pengelolaan data dan informasi SDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi bagi masyarakat dan dunia usaha yang terkait air tanah - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi bagi masyarakat dan dunia usaha yang terkait air tanah - Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi bagi masyarakat dan dunia usaha - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi bagi masyarakat dan dunia usaha - Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	
			Pemerintah Daerah	- Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	- Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha - Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			APPATINDO	Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan pedoman pelaporan hasil pengeboran air tanah untuk menunjang pengelolaan SISDA	Terlaksananya sosialisasi dan diterapkannya pedoman pelaporan hasil pengeboran air tanah untuk menunjang pengelolaan SISDA	
			KAI	Melaksanakan pelatihan metoda penulisan masalah terkait SDA di masyarakat dan pelaku usaha	Terlaksananya pelatihan metoda penulisan masalah terkait SDA di masyarakat dan pelaku usaha	
			YGN	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan permasalahan SDA kepada masyarakat lokal yang terintegrasi dengan SISDA	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan permasalahan SDA kepada masyarakat lokal yang terintegrasi dengan SISDA	
			IMA	Melaksanakan penelitian dan kajian dalam pengembangan SISDA untuk usaha pertambangan	Terlaksananya penelitian dan kajian dalam pengembangan SISDA untuk usaha pertambangan	
2.	Pengembangan Jejaring SISDA					
a	menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	1 thn stlh Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Memfasilitasi pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terfasilitasinya pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Ditetapkannya lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pengelolaan SISDA
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Dalam Negeri	Memfasilitasi pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA di daerah	Terfasilitasinya pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA di daerah	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Pertanian	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Kehutanan	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Perhubungan	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Perindustrian	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan SIH3	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan SIH3	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kelautan dan perikanan	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga dan jaringan komunikasi yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga dan jaringan komunikasi yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan SIH3	Terfasilitasinya pembentukan kelompok kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan SIH3	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Berperanserta dalam proses pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses pembentukan lembaga i yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	
			Pemerintah Daerah	Memfasilitasi pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan SIH3 sesuai kewenangan	Terfasilitasinya pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan SIH3 sesuai kewenangan	
b	membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	1 thn stlh Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Kementerian Pekerjaan Umum	Mengintensifkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Meningkatnya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama secara intensif untuk membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terbentuknya jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Dalam Negeri	Memfasilitasi pengembangan jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terfasilitasinya pengembangan jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Kementerian Pertanian	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Kementerian Kehutanaan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Kementerian Perhubungan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Kementerian Perindustrian	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan SIH3.	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan SIH3.	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Meningkatkan intensitas dan efektifitas komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk membangun jejaring SIH3 antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Meningkatnya intensitas dan efektifitas komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk membangun jejaring SIH3 antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA	
			Pemerintah Daerah	Mengintensifkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk membangun jejaring SISDA dan SIH3 antara instansi dan lembaga daerah dan pusat serta antarsektor dan antarwilayah	Meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama secara intensif untuk membangun jejaring SISDA dan SIH3 antara instansi dan lembaga daerah dan pusat serta antarsektor dan antarwilayah	
c	meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Pertanian	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat petani dan dunia usaha pertanian	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat petani dan dunia usaha pertanian	
			Kementerian Kehutanan	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Perhubungan	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Perindustrian	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat pelaku industri	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat pelaku industri	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Membangun kesepakatan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Terbangunnya kesepakatan terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Membangun kemitraan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha perikanan	Terbangunnya kemitraan dan terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha perikanan	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	
			Pemerintah Daerah	Membangun kesepakatan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Terbangunnya kesepakatan dan terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Anggota Dewan Non pemerintah	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha sesuai peran masing-masing	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha sesuai peran masing-masing	
3.	Pengembangan Teknologi Informasi					
a	mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Diterapkannya SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	
			Kementerian Dalam Negeri	Mengintegrasikan SISDA dengan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Terintegrasinya SISDA dengan SIPD	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	
			Kementerian Pertanian	Melaksanakan sosialisasi kepada unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian dan masyarakat petani untuk mendukung pengembangan SISDA	Terlaksananya sosialisasi kepada unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian dan masyarakat petani untuk mendukung pengembangan SISDA	
			Kementerian kehutanan	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 150 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Perhubungan	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait transportasi air	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait transportasi air	
			Kementerian Perindustrian	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait sektor industri	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait sektor industri	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi sistem informasi hidrogeologi.	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi sistem informasi hidrogeologi.	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi pendayagunaan SDA di bidang kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi pendayagunaan SDA di bidang kelautan dan perikanan	
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Mendukung unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengembangan SISDA	Terlaksananya dukungan terhadap unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengembangan SISDA	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SIH3	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SIH3	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menyediakan data dan informasi untuk penyusunan SISDA	Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan SISDA	
			Pemerintah Daerah	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Anggota Dewan Non pemerintah	Melaksanakan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pengembangan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional	Terlaksananya pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pengembangan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional	
b	meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Merencanakan alokasi anggaran dan melakukan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Terlaksananya perencanaan alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	
			Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas informasi SDA dalam sistem informasi profil daerah	Meningkatnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas informasi SDA dalam sistem informasi profil daerah	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	
			Kementerian Pertanian	Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasiannya untuk pemutakhiran data dan informasi SDA terkait pertanian	Tersedianya alokasi anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasiannya untuk pemutakhiran data dan informasi SDA terkait pertanian	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 152 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kehutanan	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	
			Kementerian Perhubungan	Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait transportasi air	Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait transportasi air	
			Kementerian Perindustrian	Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait industri	Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait industri	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengalokasikan anggaran dan meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi hidrogeologi serta pengoperasiannya.	Tersedianya alokasi anggaran dan meningkatnya ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi hidrogeologi serta pengoperasiannya.	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait kelautan dan perikanan	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait kelautan dan perikanan	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 153 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIH3 serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIH3 serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi data dan informasi	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasiannya	Tersedianya alokasi anggaran dan terlaksananya upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasiannya	
			Pemerintah Daerah	Mengalokasikan dana dalam APBD untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya dana dalam APBD untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi	
c	memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	menerus	Kementerian Pekerjaan Umum	Menyediakan dan memperbaharui data dan informasi SDA yang lengkap dan mudah diakses	Tersedia dan terlaksananya pembaharuan data dan informasi SDA yang lengkap dan mudah diakses	Kemudahan akses data dan informasi sumber daya air bagi para pemilik kepentingan.
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	
			Kementerian Lingkungan Hidup	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi lingkungan terkait SDA	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi lingkungan terkait SDA	
			Kementerian Pertanian	Mendukung penyediaan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait pertanian	Tersedianya dukungan penyediaan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait pertanian	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Kementerian Kesehatan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait air minum	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait air minum	
			Kementerian Kehutanan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kondisi hidrologis di kawasan hutan	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kondisi hidrologis di kawasan hutan	
			Kementerian Perhubungan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi terkait transportasi air	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi terkait transportasi air	
			Kementerian Perindustrian	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait sektor industri	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait sektor industri	
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi hidrogeologi	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi hidrogeologi	
			Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memberikan layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kelautan dan perikanan	Diterimanya layanan oleh para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kelautan dan perikanan	
			Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Memberikan layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Diterimanya layanan oleh para pemilik kepentingan dalam mengakses informasi hidrometeorologi dan klimatologi	
			Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

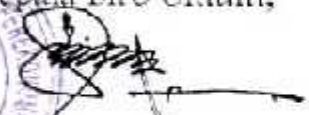
NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	TARGET WAKTU	LEMBAGA TERKAIT	URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI JAKNAS SDA	OUTPUT	OUTCOME
			Pemerintah Daerah	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA	
			Anggota Dewan Non pemerintah	Melaksanakan sosialisasi ketersediaan dan cara mengakses SISDA kepada pemilik kepentingan	Terlaksananya sosialisasi ketersediaan dan cara mengakses SISDA kepada pemilik kepentingan	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachry Soetjipto, S.H., M.H.
NIP 19531005 197303 1 001

